

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DPC PPDI KOTA  
SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Oleh :**

**Moh Nashir Hasan**

**131411029**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 5 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Moh Nashir Hasan  
NIM : 131411029  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang  
Jurusan/ Konsentrasi : PMI/ Kesehatan Lingkungan  
Judul : PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH  
DPC PPDI KOTA SEMARANG

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juni 2018

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan tata Tulis

  
Sulistio, S.Ag., M.Si

NIP. 19700202 199803 1 005

  
Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I

NIP. 19800816 200710 1 003

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DPC PPD1

KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :

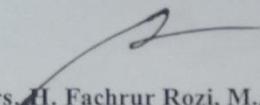
Moh Nashir Hasan

131411029

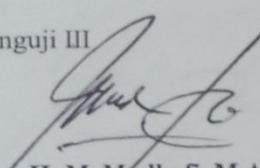
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 24 Juli 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan DewanPenguji:

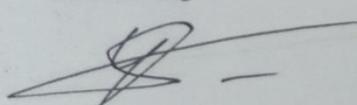
Ketua Sidang/Penguji I

  
Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.  
NIP. 19690501 199403 1 001

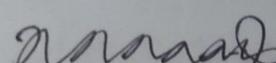
Penguji III

  
Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag  
NIP. 19690830 199803 1 001

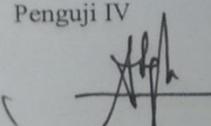
Pembimbing 1

  
Sulistio, S.Ag., M.Si  
NIP. 19700202 199803 1 005

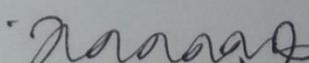
Sekretaris/Penguji II

  
Agus Riyadi, S.Sos.I, M.SI  
NIP. 19800816 200710 1 003

Penguji IV

  
Abdul Ghoni, M.Ag  
NIP.19770709 200501 1 003

Pembimbing 2

  
Agus Riyadi, S.Sos.I, M.SI  
NIP. 19800816 200710 1 003



Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 3 Agustus 2018

Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.  
NIP. 19610727 200003 1 001

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja peneliti sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dan hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Juli 2018



Moh Nashir Hasan

(131411029)

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis saat ini mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang”*. Sholawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pemilik akhlak mulia yang telah memberikan contoh kepada manusia bagaimana cara bersosial dan memperlakukan manusia lainnya dengan adil, yang selalu kita nantikan dan harapkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi yang telah penulis susun ini guna untuk memenuhi satu syarat memperoleh gelar sarjana satu (S1) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Walisongo Semarang. Usaha penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, patut kiranya penulis memberikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Suprihatiningsih, M.Si, dan Agus Riyadi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan izin penelitian.
4. Sulistio, S.Ag., M.Si, dan Agus Riyadi, M.S.I, selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk menulis dengan baik.
5. Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mengantarkan penulis hingga akhir studi.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin layanan perpustakaan yang diperlukan penulis dalam setiap penyusunan skripsi.
7. Seluruh kepengurusan DPC PPDI Kota Semarang, komunitas penyandang disabilitas yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi.
8. Kepada Ibu saya yaitu Ibu Zumaroh yang tidak pernah lelah memberikan do’a kepada anaknya. Kepada Alm. Bapak saya Bapak Abu Hasan lewat keringat dan jerih payahnya selama ini memberikan saya semangat serta arti untuk hidup.

9. Kepada seluruh guru yang telah memberikan saya ilmu mendidikan saya agar menjadi pribadi yang berkahlaq baik semoga umur panjang dan keberkahan selalu menyertai mereka.
10. Kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu men-*support* saya dengan berbagai cara, menyemangati dikala penulis sedang menemui kendala dalam penulisan skripsi. Semoga semangat kebersamaan selalu ada dan diberikan yang terbaik untuk masa depan kita semua.
11. Serta kepada semua pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas selaga bentuk bantuan yang telah saya terima.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin namun karena keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari hasil dari skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya kritik serta saran yang membangun penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi panulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Juli 2018

Moh Nashir Hasan

## PERSEMBAHAN

*Allhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, dengan izin dan ridha Allah SWT, usaha dari penulis, doa dan restu dari orang-orang yang menyayangi saya, akhirnya penyusunan karya ilmiah skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua saya, Alm. Bapak Abu Hasan dan Ibu Zumaroh. Kepada ibu Suharti yang telah memberikan berbagai bentuk kasih sayang dari mulai saya lahir kedunia hingga saat ini saya telah menyelesaikan jenjang S1.
2. Kepada Lek Sukirno Ahmad, atas segala bentuk bantuan serta perhatiannya. Sehingga saya dapat menempuh pendidikan dengan lancar serta dapat melanjutkan pendidikan dengan layak. Sampai-sampai saya merasa seperti menjadi anak kandung beliau. Semoga Allah membalas kebaikan serta menjadikan beliau pribadi yang selalu taat beragama serta selalu dilindungi dan diberi keberkahan disetiap langkahnya.
3. Kepada kedua saudara perempuan saya, mbak ayik dan mbak lilik yang ada untuk memberikan gagasan-gagasan baru untuk lebih maju kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, kesuksesan dan nikmat sebagai muslim yang memiliki iman yang tebal sehingga suatu saat nanti kita dapat bertemu kembali. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

## MOTTO

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.....

“.....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri....(Ar-Ra’d: 11)”

“Di alam ini tiada yang bernoda kecuali pikiran; tak seorang pun boleh disebut cacat kecuali yang  
kejam”

(William Shakespearce, *Twelfth Night*)

## ABSTRAK

Moh Nashir Hasan (131411029): Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang.

Pemberdayaan adalah solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas Kota Semarang. Namun masalah penyandang disabilitas yang kompleks mempersulit pemberdayaan penyandang disabilitas. Diskriminasi kepada penyandang disabilitas yang terjadi membuat penyandang disabilitas tidak mempunyai daya dalam suatu masyarakat, kenyataan tersebut membuat penyandang disabilitas semakin sulit untuk mandiri dalam kehidupannya. Pemberdayaan oleh DPC PPDI Kota Semarang bertujuan untuk membuat penyandang disabilitas mempunyai daya agar mampu menjalani kehidupan secara lebih baik, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Fokus dari penelitian ini adalah ingin mengetahui (1) Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh DPC PPDI Kota Semarang (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh DPC PPDI Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitiannya yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui sumber utama seperti pemangku kepentingan pemberdayaan penyandang disabilitas di PPDI Kota Semarang. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas seperti buku, jurnal dan internet. Teknik analisis data yang meliputi: (1) Reduksi data. Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan yang penting dari situ memberikan gambaran yang jelas untuk pengumpulan data selanjutnya. (2) Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain sejenisnya. (3) Penyimpulan. Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang. (2) Mengataui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang menggunakan strategi (1) Motivasi (2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan (3) Manajemen diri (4) Mobilisasi sumber daya (5) Pembangunan dan pengembangan jejaring. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang, (1) *Strengths*. Semangat dari DPC PPDI Kota Semarang, DPC PPDI Kota Semarang Tanggap dengan keadaan serta kebutuhan penyandang disabilitas. (2) *Opportunities*. Dukungan dari pemerintah, dukungan dari relawan, dukungan dari LSM, Antusiasme penyandang disabilitas, antusiasme dari nondisabilitas tinggi. (3) *Weakness*. Keterbatasan waktu anggota PPDI, anggota organisasi yang tidak patuh. (4) *Threats*. Kecemburuan dari kelompok disabilitas lain, sulitnya memberikan pemahaman tentang organisasi penyandang disabilitas, pendataan penyandang disabilitas yang masih sangat sulit.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas, DPC PPDI Kota Semarang.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan .....	9
2. Sumber dan Jenis Data .....	10
3. Teknik dan Pengumpulan Data .....	10
4. Teknik Analisis Data .....	12

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Pemberdayaan Masyarakat .....	14
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	15
2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat .....	15
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	17
4. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	19
5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat .....	22
6. Indikator Keberdayaan .....	22
7. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	23
B. Disabilitas .....	24
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	24
2. Ragam Penyandang Disabilitas .....	25

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

A. Gambaran Umum DPC PPDI Kota Semarang .....	31
1. Profil PPDI.....	31
2. Visi dan Misi PPDI.....	33
3. Usaha PPDI.....	33
4. Struktur Organisasi PPDI.....	34
5. Makna Logo PPDI .....	35
6. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang .....	36
B. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang.....	36
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang .....	43

### **BAB IV : ANALISIS**

A. Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang.....	48
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang .....	63
1. Faktor Pendukung .....	65
2. Faktor Penghambat .....	67

### **BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran-Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ragam Penyandang Disabilitas .....	26
Tabel 2.	Banyaknya Penyandang Disabilitas .....	36
Tabel 3.	Perbedaan Sikap Orang-orang yang Mengalami dan Tidak Mengalami Pemberdayaan .....	62
Tabel 4.	Analisis SWOT .....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang terlahir ke dunia ini pasti mengharapkan menjadi individu yang sehat dan utuh tanpa kekurangan satu pun dari bagian tubuhnya. Keadaan yang sehat tadi akan berubah ketika seseorang kehilangan salah satu anggota tubuhnya baik karena kecelakaan maupun karena sebab lain. Anggota keluarga juga banyak yang merasakan kekhawatiran terhadap anggota keluarga lain yang menjadi penyandang disabilitas, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kondisinya kelak.

Di Indonesia, kaum disabilitas mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan dimuali dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan.<sup>1</sup> Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas justru tidak mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau *mindset* anggota keluarga yang nondisabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagai warga

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. *Masyarakat ASEAN Edisi 11: Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis*, Majalah Online diakses pada tanggal 29 September 2017 dari <http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>

negara Indonesia.<sup>2</sup> Jadi penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berdaya, menentukan nasib mereka dan hak-hak mereka. Pemberdayaan tidak saja untuk masyarakat nonpenyandang disabilitas tetapi penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan hal yang sama. Agama, dalam hal ini adalah Islam tidak memberikan hak-hak istimewa tertentu bagi seseorang hal itu tercermin di dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : 'Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.' (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, akan tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.<sup>3</sup> Ayat ini menegaskan bahwa Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik disebabkan keturunan maupun warna kulit, kesukuan, kebangsaan atau keadaan fisik. Keberadaan perbedaan bangsa dan suku (yang sebagian termanifestasi dalam perbedaan warna kulit dan tampilan fisik lainnya) dimaksudkan agar manusia saling mengenali satu sama lain dan dapat melihat melewati perbedaan fisik tersebut. Secara tersirat juga dapat dipahami bahwa kondisi khusus para penyandang disabilitas pun bukan untuk mendiskriminasi mereka, tetapi agar sesama manusia dapat saling memahami dan bersama-sama mencari jalan kemuliaan

<sup>2</sup> Ledia Hanifa Amaliah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016), hlm. 8-9

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirannya Jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 420

ketakwaan dihadapan Allah Sang Maha Pencipta.<sup>4</sup> Penjelasan ayat di atas juga didukung dalam Hadits:

1776- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا

يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ"

Artinya : 1776. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu (tubuhmu) dan hartamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu”.<sup>5</sup>

Hadits tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Allah tidak melihat fisik seseorang, tidak melihat bagaimana rupa seseorang tidak peduli seseorang tersebut mempunyai kulit yang putih, hitam, kuning, tinggi atau pendek. tidak melihat seberapa banyak harta yang dimiliki tidak peduli dia kaya raya atau miskin, tetapi Allah hanya melihat hati dan perbuatan seseorang.

Sejalan dengan ditetapkannya *Convention On the Right Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam UU No. 19 Tahun 2011. Oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan isi konvensi tersebut dan secara rutin memberikan laporan mengenai pelaksanaan telah memiliki perspektif mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu bentuk berdaya bagi masyarakat penyandang disabilitas adalah adanya kesempatan untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, jadi melibatkan mereka sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai tahap evaluasi suatu kebijakan program dapat berdampak positif bagi penyandang disabilitas itu sendiri karena mereka yang tau apa yang kurang berdaya dan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang tahun 2014 adalah 3.557,<sup>7</sup> jumlah penyandang disabilitas tersebut tentu tidak bisa dijadikan patokan pasti jumlah

<sup>4</sup> Ledia Hanifa Amaliah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016), hlm. 10

<sup>5</sup> M. Nashiruddin al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 907 hadits no. 1776

<sup>6</sup> Tim Indepth Rights PPRBM Yayasan Bhakti Luhur. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang: CBM, 2016), hlm. 3

<sup>7</sup> Lihat Kota Semarang dalam Angka 2014, hlm., 368

sesungguhnya penyandang disabilitas Kota Semarang karena sulit dalam pendataannya dikarenakan banyak penghambat salah satunya adalah banyak keluarga yang malu mengakui anggota keluarganya tersebut sebagai penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dilakukan secara menyeluruh (holistik) yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari: orang tua, agen pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, masyarakat dan juga penyandang disabilitasnya. Pemberdayaan ini dilakukan dalam satu visi yang sama, memberikan peran kepada penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.<sup>9</sup> Pemberdayaan penyandang disabilitas sangat penting untuk memberi kemampuan kepada mereka sehingga dapat menjalankan aktivitas kehidupan lebih baik, oleh karena itu para *stakeholder* seperti orang tua, agen pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, masyarakat dan juga penyandang disabilitas harus mampu bekerja sama agar terciptanya suatu lingkungan yang inklusif dalam suatu masyarakat.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas sangat penting demi pemenuhan hak dan pemberian kemampuan kepada penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan sehingga potensi dan kemampuan mereka tergali secara maksimal. PPDI sebagai organisasi penyandang disabilitas paling tua berkomitmen sesuai dengan visi mereka yaitu partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. DPC PPDI Kota Semarang adalah organisasi payung dan sekaligus sebagai wadah bagi organisasi/kelompok disabilitas yang ada di Semarang.

DPC PPDI Kota Semarang sebagai wadah bagi organisasi/lembaga penyandang disabilitas memahami betul bagaimana kebutuhan para penyandang disabilitas khususnya di Semarang. Lewat berbagai kebijakan programnya dan bekerja sama dengan pemerintah daerah PPDI telah berjuang demi pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Beberapa program pemberdayaan dalam DPC PPDI Kota Semarang antara lain adalah Pemberdayaan kelompok disabilitas khususnya yang ada di Kota Semarang contohnya adalah pemberdayaan kelompok Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) dengan mengadakan Program Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo), PPDI ikut berupaya untuk menyebar luaskan Bisindo kedalam masyarakat, manfaat dari program ini

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang)., Tanggal 3 September 2017

<sup>9</sup> Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 140

adalah melestarikan bahasa isyarat Indonesia agar dipahami oleh masyarakat umum serta penyandang disabilitas tuli yang masih awam mengenai Bisindo. Tujuannya adalah membantu menyebarkan Bisindo ini agar dapat menjadi bahasa isyarat standar Indonesia seperti yang dicangkan organisasi tuna rungu di seluruh Indonesia.

Pemberdayaan kelompok yang lain adalah memberdayakan kelompok Karunia Ilahi dalam pemberdayaan kelompok ini PPDI mengadakan pelatihan kerajinan tangan/*Handicraft* merupakan bagian dari kegiatan dari para penyandang disabilitas, kegiatan ini adalah kegiatan mengolah bahan-bahan yang telah dipilih untuk dimanfaatkan kegunaannya. Program ini sangat penting juga karena dapat menumbuhkan kepercayaan diri dari kegiatan mengoptimalkan potensi dan kreatifitas penyandang disabilitas. Kerajinan tangan ini memanfaatkan barang-barang yang telah dibuang atau barang-barang yang dianggap tidak ada nilainya dan diolah kembali menjadi barang-barang yang bernilai jual.

DPC PPDI Kota Semarang bertekad untuk mengangkat hak-hak penyandang disabilitas, dengan pemberdayaan DPC PPDI Kota Semarang berusaha mengangkat moral para penyandang disabilitas dari keadaan yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri menghadapi kehidupan. Beberapa contoh dari pemberdayaan disabilitas adalah pelatihan Bisindo untuk melatih para penyandang disabilitas tuna rungu yang belum mengetahui apa itu Bisindo menjadi bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peminjaman kursi roda bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan agar mobilitas sehari-hari penyandang disabilitas lebih baik. Memprakarsai pembentukan organisasi pembentukan organisasi yang menjadi penghubung antara dinas-dinas dengan seluruh organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang, menjadi anggota dari kementerian koperasi dalam FKS (forum kementerian Semarang) untuk UMKM. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam di DPC PPDI Kota Semarang.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan :

- a) Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang.
- b) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang.

### 2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat teoretik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi ilmiah terhadap kajian-kajian tentang pemberdayaan penyandang disabilitas.
- b) Manfaat praktis, yaitu diharapkan mampu menggambarkan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan DPC PPDI Kota Semarang.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, kajian mengenai pemberdayaan disabilitas di Indonesia masih relatif sedikit. Beberapa kajian yang telah dibahas tentang pemberdayaan disabilitas antara lain sebagai berikut :

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Mia Maisyatur Rodiah (2014), yang berjudul "*Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisama Cheshire Jakarta Selatan*". Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dengan seksama pelaksanaan pemberdayaan melalui keterampilan di Yayasan Wisma Cheshire serta menjelaskan pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok disabilitas melalui kegiatan keterampilan di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan. Metode pelaksanaan pemberian keterampilan Yayasan Wisama Cheshire tidak memberikan kursus atau pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas dalam

keterampilan woodwork ataupun handicraft. Keterampilan tersebut dilakukan dengan cara saling mengajarkan kepada juniornya, sehingga antara anggota/resident baik yang lama ataupun yang baru akan saling mengajarkan. Metode tersebut biasa disebut dengan metode learning by doing yaitu belajar sambil bekerja/praktif.<sup>10</sup>

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faozan (2016), jenis penelitian individual yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft)*”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kelaitatif. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pemberdayaan ekonomi difabel pada usaha dagang (UD) Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah. Pemberdayaan Ekonomi Difabel UD. Handycraft yang berlokasi di Desa Karang Sari RT 01/01 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. UD. Tersebut kini memiliki Gedung Asrama dan Workshop bagi para difabel. UD. Mutiara Handicraft yang berkerjasama dengan pemerintah daerah. Sugiyanto juga sering diajak untuk memberikan pelatihan-pelatihan diberbagai daerah. Dengan demikian maka para difabel dalam aspek sosial bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat sekitar, agar lebih berinteraksi serta mempererat jalinan silaturahmi. Proses pemberdayaan tak terlepas dari adanya strategi pemberdayaan masyarakat difabel yang ditetapkan di UD. Mutiara Handycraft sebagai Berikut : 1. Motivasi, 2. Sharing pribadi, 3. Pelatihan bervariasi 4. Pemberian modal usaha.<sup>11</sup>

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah (2014), yang berjudul “*Pemberdayaan Keterampilan Menyulam Bagi Penyandang Tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB-C) Sumber Budi Jakarta Selatan*”). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kelitativ dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan program pemberdayaan keterampilan menyulam bagi tunarungu di SLB B-C Sumber budi Jakarta Selatan. Program Pemberdayaan yang diberikan kepada siswa-siswinya adalah keterampilan menyulam, keterampilan ini diajarkan kepada anak-anak tingkat SD dan SMP, pada tingkat SD hanya diajarkan pelatihan dasarnya atau cara tusuk-meniskus dan untuk tingkat SMP penerapan pada kain-kainnya. Tujuan dari diadakannya

---

<sup>10</sup> Mia Maisyatur Rodiah, “*Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*”, dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2014

<sup>11</sup> Ahmad Faozan, “*Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syariah*”, dalam Jurnal IAIN Purwokerto 2016

pelatihan menyulam ini adalah anak-anak mempunyai keterampilan setelah lulus terutama keterampilan menyulam.<sup>12</sup>

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Purwandari (2009) yang berjudul *“Pengembangan (RBM) bagi Penyandang Cacat Korban Gempa Bumi Tektonik di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman.”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dasar potensi desa di wilayah penelitian yang dikatan dengan penyandang cacat korban gempa, diperolehnya data dsar angkat prevelensi penyandang cacat, adanya kepedulian dari masyarakat terhadap pentingnya memberikan layanan rehabilitasi bagi penyandang cacat korban gempa.<sup>13</sup>

**Kelima**, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Krisna Harhjanti (2009) yang berjudul *“Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan rencana Undang-Undang penyandang disabilitas sebagai konsekuensi telah diratifikasiya Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat dan protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006) dan telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat. Metode penelitiannya adalah juridis normatif yang mengemati dan menganalisis urgensi pengeturan tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya kajian tentang pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan membahas tentang disabilitas baik cara pemberdayaanya, hak-hak disabilitas dan lain sebagainya. Sedang penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas, perbedaannya adalah melalui pelatihan-pelatihan yang disesuaikan sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas khususnya yang ada di Kota Semarang yang

---

<sup>12</sup> Nur Hikmah, *“Permemberdayaan Keterampilan Menyulam Bagi Penyandang Tunarungu di Sekeolah Luar Biasa (SLB B-C) Sumber Budi Jakarta Selatan”*, dalam skirpsi Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

<sup>13</sup> Purwandari, *“Pengembangan Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Bagi Penyandang Cacat korban Gempa Bumi Tektonik di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman.”*, dalam Jurnal Penelitian Humaniora, Vol 14 No. 2, Oktober 2009

<sup>14</sup> Dewi krisna Harhjanti, *“Kajian Yuridis Penyandang Disabilitas”*, dalam Jurnal Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016

telah direncanakan terlebih dahulu guna memperoleh manfaat. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain adalah pelatihan bahasa isyarat dan pelatihan kerajinan tangan atau *handicraft* oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Dewan Pengurus Cabang Kota Semarang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah sikap, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>16</sup>

Data yang terhimpun tersebut bisa berasal dari wawancara, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan data aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi, juga menentukan masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana yang akan datang.<sup>17</sup> Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya mendeskripsikan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang melalui berbagai program kegiatan serta faktor pendukung dan penghambat yang ada di dalamnya.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam antara lain adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Data sekunder adalah

---

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm., 33

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 3-5

<sup>17</sup> Jalaludin Rakhmat, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25

informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga.<sup>18</sup>

a) Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu diperoleh dari pengurus DPC PPDI Kota Semarang. Pengumpulan data primer dimulai dengan melakukan observasi awal. Hasil obesrvasi kemudian dikonfirmasi kepada informan awal.<sup>19</sup> Data primer diperoleh dari observasi dan informan yang terkait dengan pemberdayaan DPC PPDI Kota Semarang. Data sekunder diperoleh dari leteratur dan hasil penelintinan yang terkait dengan Program DPC PPDI Kota Semarang.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dihimpun dari dokumen, arsip, cacatan-cacatan, foto. Atau sesuatu yang berkaitan dengan Program DPC PPDI Kota Semarang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengkaji sebagian literatur dan hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan DPC PPDI Kota Semarang. Data sekunder digunakan sebagai pendukung yang memperkuat data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk menghimpun data serta informasi yang diperlukan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti sesuai yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut:

a) Observasi

Peneliti melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Peneliti disini sebagai *Participant Observer*, Yaitu suatu bentuk observasi dimana peneliti secara tetatur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi gendam sebagai peneliti yang tak diketahui dan

---

<sup>18</sup> Eko Gugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Merdeka, 2015), hlm. 87

<sup>19</sup> Eko Gugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Merdeka, 2015), hlm. 88

dirasakan oleh anggota lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.<sup>20</sup>

Peneliti melakukan observasi sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang objektif sehingga mendapatkan tema permasalahan dalam pemberdayaan didalam DPC PPDI Kota Semarang. Dalam pengamatan ini peneliti mengikuti sebagian kegiatan pemberdayaan. Peneliti melakukan penelitian terkait pemberdayaan disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang, terkait kegiatan, waktu, tempat, dan faktor penghambat dan pendukungnya.

b) *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>22</sup>

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data dari lapangan dengan cara tanya jawab kepada Ibu Leli selaku ketua DPC PPDI Kota Semarang, kepada Mas Fitra sebagai ketua Gerkatina Kota Semarang, kepada Mbak Indira selaku ketua Bisindo Kota Semarang sebagai organisasi yang bekerja sama dengan DPC PPDI Kota Semarang, serta kepada Mbak Khomsih ketua kelompok penyandang disabilitas yang dibentuk oleh DPC PPDI Kota Semarang. Wawancara tersebut dilakukan dengan catatan tulisan tangan atau dengan menggunakan perekam suara.

---

<sup>20</sup> Eko Gugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Merdeka, 2015), hlm. 384

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135

<sup>22</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 374

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Data yang dihimpun adalah data yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan disabilitas dari DPC PPDI Kota Semarang baik yang berupa laporan-laporan yang terangkum dalam inventarisir dokumen DPC PPDI Kota Semarang. Selain itu peneliti juga menghimpun dokumen dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan/menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan serta bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti.<sup>24</sup> Dan dalam proses menganalisis data kualitatif terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b) Penyajian Data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

---

<sup>23</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm, 219

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 92

- c) Kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian. Dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm, 212

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberdayaan Masyarakat

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.<sup>26</sup> Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>27</sup>

Pengertian “proses” merujuk pada serangkaian pada tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk menubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memili keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuata/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaana atau

---

<sup>26</sup> Lihat Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 118

<sup>27</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 77

<sup>28</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 77

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>29</sup>

Sudah cukup jelas penjelasan tentang pengertian pemberdayaan di atas namun secara singkat dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah suatu gerakan penguatan daya suatu masyarakat agar masyarakat mampu mandiri dan dapat menentukan/memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek yang diraskan kurang berdaya.

## 2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Seorang pemberdaya mempunyai sebuah landasan dalam melakukan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>30</sup> Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a) Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.
- b) Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini

---

<sup>29</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 59-60

<sup>30</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 37-40

pengembangan masyarakat melengkapinya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c) Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d) Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.

Sebagai tambahan adapun prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise, dalam Sutrisno, dalam Jamaludin terdiri atas sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini, pengelolaan dan para *stakeholder* menyetujui tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencaai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b) Partisipasi (*participation*), yaitu setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c) Konsep keberlanjutan, yaitu pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program, pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- e) Keuntungan sosial dan ekonomi, yaitu bagian dari program pengelolaan.

DPC PPDI Kota Semarang adalah salah satu *stakeholder* dalam perjuangan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas Kota Semarang, peran PPDI sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah

---

<sup>31</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 249

daerah karena PPDI dinilai bisa menjadi rekan dalam analisis kebutuhan atau analisis masalah penyandang disabilitas Kota Semarang.

### 3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ada 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, antara lain:<sup>32</sup>

#### a) Motivasi

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

#### b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

#### c) Manajemen diri

Setiap kelompok-kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemimpinan masyarakat. Pada tahap awal, pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok

---

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 104

kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d) Mobilisasi sumber daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e) Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan bagi para anggotanya membangun dan mempermudah jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro:

- a) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress manajement*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan,

perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat.<sup>33</sup>

Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- c) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- d) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesempatan berusaha.

#### **4. Metode Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab setiap fasilitator adalah mengakomodasikan inovasi, dalam rangka mengubah perilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Dalam hubungan ini, perlu diingatkan bahwa penerima manfaat

---

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 66

<sup>34</sup> Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 87-88

pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam baik beragam mengenai karakteristik individualnya, beragam lingkungan fisik dan sosialnya, beragam pula kebutuhan-kebutuhannya, motivasi, serta tujuan yang diinginkannya.<sup>35</sup> Oleh karenanya dalam proses pemberdayaan masyarakat harus bisa merata kepada semua lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing demi perbaikan mutu kehidupannya, baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, atau aspek lain yang mereka rasakan kurang atau perlu diberdayakan.

Dengan demikian, tepatlah jika Kang dan Song (1984) menyimpulkan tentang tidak adanya satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan menurutnya, dalam banyak kasus, kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan menerapkan beragam metode sekaligus yang paling menunjang dan melengkapi. Karena itu, di dalam setiap pelaksanaan memilih metode pemberdayaan masyarakat yang paling baik sebagai suatu “cara yang terpilih” untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya.<sup>36</sup> Pemilihan metode yang tepat dapat mendukung tercapainya suatu tujuan kebijakan/program/kegiatan tertentu oleh karena pemilihan metode harus berdasarkan kegunaan dan tujuannya masing-masing.

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metodologi ialah suatu sistem berbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan. Oleh karena itu kerangka kerja harus disesuaikan dengan tujuan dan objek yang akan diberdayakan.<sup>37</sup> Dalam praktik pemembangan masyarakat, terdapat beragam metode antara lain:

a) RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

Metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang

---

<sup>35</sup> Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 197

<sup>36</sup> Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 197

<sup>37</sup> Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 197

khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

b) PRA (*Participatory Rapid Appraisal*)

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksanaan program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

c) FGD (*Focus Group Discussion*)

Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal, yang oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi-kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku-pemangku suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang nara-sumber.

d) PLA (*Participatory Learning and Action*)

Singkat singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui: ceramah, curah-pendapat, diskusi, dll.), tentang sesuatu topic seperti: persemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama tanaman, dll. Yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.

e) SL atau Sekolah Lapangan (*Farmer Field School*)

Sebagai metode pemberdayaan masyarakat, SL/FFS merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian

diikuti dengan curah pendapat, berbagai pengalaman (*sharing*), tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar bersama, SL/FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten.

## 5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, tahapan-tahapan yang dilalui tersebut meliputi:

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga agar terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.<sup>38</sup>

## 6. Indikator Keberdayaan

Menurut Kiefer pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipasi. Parson mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

---

<sup>38</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogya: Gava Media, 2004). hal 83.

- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.<sup>39</sup>

## 7. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Berdasarkan pernyataan ini, pada dasarnya pemberdayaan meliputi dua kata kunci, yaitu kekuasaan (*power*) dan kurang beruntung (*disadvantaged*).<sup>40</sup>

- a) Kekuasaan. Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan. Kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.
- b) Kekurang beruntungan. Lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Dengan demikian, pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal.

---

<sup>39</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 63

<sup>40</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). hlm. 247-248

## B. Disabilitas

### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen.<sup>41</sup> Kata istilah yang diletakkan pada para penyandang cacat (baik dalam bahasa Indonesia atau pun Inggris) selama ini lebih banyak mengacu kepada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi negatif. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negatif. Tuna berarti hilang atau tidak memiliki, sedangkan cacat berarti rusak. Begitu juga dalam bahasa Inggris, ada kata *disability* yang artinya ketidakmampuan, *invalid* yang berarti tidak lengkap.<sup>42</sup> Kata cacat itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda batin atau akhlak).<sup>43</sup> Padahal jika kita renungkan lagi setiap manusia yang lahir di dunia entah dalam bentuk apapun adalah seorang pribadi manusia yang utuh dengan keunikannya masing-masing. Maka pandangan negatif seperti menganggap penyandang disabilitas adalah obyek yang harus dikasihani dan dianggap tidak mampu atau hanya sebagai penghambat harus dihilangkan, anggapan-anggapan tersebut perlahan harus dikikis.

Undang-Undang tentang disabilitas telah menjelaskan secara jelas istilah disabilitas itu sendiri, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

---

<sup>41</sup> Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, hlm. 17

<sup>42</sup> Jurnal Perempuan, *Mencari Ruang Untuk Difabel*, (Jakarta Selatan: Yayasan JYP Jurnal Perempuan, hlm. 18

<sup>43</sup> Lihat Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 198

kesamaan hak.<sup>44</sup> Dalam Undang-Undang yang dulunya adalah penyandang cacat kini diganti menjadi penyandang disabilitas.

Istilah yang digunakan oleh akademisi maupun masyarakat sebagai alternatif untuk istilah cacat. Diantaranya adalah disabilitas, berkebutuhan khusus, spesial, dan difabel.<sup>45</sup> Penggunaan kata yang tepat dan sesuai, tidak menyinggung para penyandang disabilitas harus diperhatikan.

Istilah mana yang lebih disukai atau dianggap pas, tentunya tergantung para penyandang disabilitas sendiri. Seperti pada umumnya kemajemukan pandangan dalam berbahasa, suatu kata yang dianggap ‘sopan’ atau ‘halus’ atau ‘wajar’ bagi satu mungkin dianggap ‘kasar’, ‘jahat’ atau ‘menghina’ oleh orang lain.<sup>46</sup> Sebagai contoh penyebutan tuna rungu para para penyandang gangguan pendengaran sebagian besar dari mereka tidak menyukai disebut dengan tuna rungu, karena mereka menganggap tuna rungu sebagai bentuk dari belas kasih, mereka lebih nyaman di panggil dengan tuli. Oleh karena itu kita juga harus tahu dan memahami cara berbahasa yang baik dan bersikap yang pas saat berhadapan dengan para penyandang disabilitas.

## 2. Ragam Penyandang Disabilitas

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental/intelegensi, dan disabilitas ganda. Secara lebih detail, pengklasifikasikan penyandang disabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Tim Indepth Rights PPRBM Malang, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang: CBM, 2016), hlm. 8

<sup>45</sup> Ledia Hanifa Amaliah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016), hlm. 2

<sup>46</sup> Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 136

Tabel 1. Ragam Penyandang Disabilitas<sup>47</sup>

<b>Tipe</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis</b>	<b>Pengertian</b>
<b>A</b>	Tunanetra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat; buta
<b>B</b>	Tunarungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar; tuli
<b>C</b>	Tunawicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat berbicara; bisu
<b>D</b>	Tunadaksa	Disabilitas fisik	Cacat tubuh
<b>E1</b>	Tunalaras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
<b>E2</b>	Tunalaras	Disabilitas mental	Sukar mengendalikan emosi dan sosial
<b>F</b>	Tunagrahita	Disabilitas mental	Cacat pikiran; lemah daya tangkap; idiot
<b>G</b>	Tunaganda	Disabilitas ganda	Penderita cacat lebih dari suatu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

Penyandang disabilitas memiliki karakteristik tertentu terkait dengan kondisi fisik maupun psikis. Karakteristik tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pendidik dalam proses belajar mengajar. Beberapa karakteristik disabilitas adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a) Tunanetra

Menurut Kaufirman & Hallahan dalam Mudjito, dkk. Mendefinisikan tunanerta sebagai gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun kebutaan total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak lagi memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan lemah penglihatan (*low vision*).

<sup>47</sup> Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, hlm. 19

<sup>48</sup> Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, hlm. 20

Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat tactual dan bersuara, adalah *tape recorder* dan peranti lunak JAWS.

Untuk membantu tunetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium).

#### b) Tunarungu

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- 1) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40dB)
- 2) Gangguan pendengaran ringan (41-55dB)
- 3) Gangguan pendengaran sedang (56-70dB)
- 4) Gangguan pendengaran berat (71-90dB)
- 5) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90dB)

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari. Abjad jari sendiri telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap Negara.

Saat ini beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara komunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

c) Tunagrahita

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Anak-anak penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi.

Rata-rata anak-anak tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang utama:

- 1) Fungsi intelektual, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar dari pada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam berkomunikasi.
- 2) Perilaku adaptif, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan berhubungan dengan orang-lain.

Oleh karena itu, pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Proses pembelajaran mungkin lebih dikritik beratkan pada aktivitas sehari-hari atau keterampilan mengurus sendiri, serta pada keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan penghuni rumah dan liburan bersama keluarga.

d) Tunadaksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan. Termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, gangguan sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, sedangkan gangguan berat yaitu memiliki keterbukaan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

Proses pembelajaran pada tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersangkutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan hambatan dalam proses belajar. Namun secara fisik mereka memiliki hambatan dalam mobilitas. Oleh karena itu lembaga pendidikan perlu menyediakan sarana

dan prasarana yang memudahkan mereka melakukan mobilitas, seperti tangga berjalan atau eskalator yang memudahkan pemakai kursi roda, dan lain sebagainya.

e) Tunalaras

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku di sekiranya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar.

Proses pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, maka jenis-jenis atau macam-macam kecacatan atau difabel dapat dikategorikan antara lain:<sup>49</sup>

a) Cacat fisik

Yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain, gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah: a) cacat kaki, b) cacat punggung c) cacat tangan d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat runtu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Cacat tubuh memiliki banyak istilah, salah satunya adalah tuna daksa. Istilah ini berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.

---

<sup>49</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), hlm. 10-11

2) Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; *celebral palsy*; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh *orthopedi*; *paraplegia*.

b) Cacat mental

Yaitu kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

c) Cacat ganda atau cacat fisik dan mental

Yaitu keadaan seseorang yang meyanggah dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum DPC PPDI Kota Semarang**

##### **1. Profil DPC PPDI Kota Semarang**

Sejarah terbentuknya PPDI adalah adanya niat menyatukan seluruh organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ke difabelannya. Kapanjangan dari PPDI adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia sebagai Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPDI yang berada di Kota Semarang adalah kapanjangan tangan dari Dewan Pengurus Pusat PPDI.<sup>50</sup> Bentuk kepedulian DPC PPDI Kota Semarang kepada penyandang disabilitas adalah untuk menjadikan DPC PPDI Kota Semarang sebagai payung bagi seluruh penyandang disabilitas baik individu maupun kelompok untuk menyalurkan aspirasi, masukan, kritik kepada pemerintah. Sampai sekarang banyak bermunculan organisasi penyandang disabilitas sesuai dengan ke difabelannya. Sejak 2016 DPC PPDI Kota Semarang dipimpin oleh Ibu Leli dengan berbagai program kerja yang telah dilakukan hingga kini DPC PPDI Kota Semarang telah bekerja sama dengan para pemerhati nasib penyandang disabilitas baik itu pemerintah, LSM maupun aktivis-aktivis. Dengan adanya DPC PPDI Kota Semarang diharapkan mampu memberikan harapan lebih kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak yang mereka belum dapat. Lewat advokasi baik kepada individu maupun kelompok mampu menggerakkan semangat gerakan penyandang disabilitas agar terus menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah maupun masyarakat. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berdiri pada tahun 1989 yang dulu masih bernama Persatuan penyandang Cacat Indonesia (PPCI).

Rapat kerja nasional tahun 2012 telah menghasilkan sebuah sejarah baru bagi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI). Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 telah disepakati penggantian istilah “cacat” dengan istilah “disabilitas”. Dengan begitu akronim PPCI mulai hari ini berganti menjadi PPDI. Disela-sela sidang rakernas muncul gagasan untuk menggelar MUNASLUB dengan agenda penggantian istilah ‘cacat’

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 30 Januari 2018

menjadi ‘disabilitas’ sesuai dengan undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Hal itu disetujui oleh peserta sidang. Pada saat sidang sempat mengemuka berbagai usulan nama pengganti PPCI. Namun, pada akhirnya forum bersepakat bahwa penggantian hanya untuk istilah ‘cacat’. Ratosimo (Pengurus Federasi untuk Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia) mengapresiasi sidang yang hanya cukup mengganti istilah cacat dengan disabilitas, dengan begitu tidak menghilangkan nilai sejarah pada awal mula pembentukan PPCI. Anni Juwairiyah selaku Ketua Pantia dan juga Ketua DPD Kalimantan Timur merasa bangga dengan penggantian tersebut, sejarah baru telah ditorehkan di Kalimantan Timur dalam penggantian istilah bagi PPCI.<sup>51</sup>

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPCI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas. PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD.<sup>52</sup> PPDI bersifat nonpartisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional. PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ppdi.or.id, 2012. “PPCI berganti nama menjadi PPDI”, dalam <https://ppdi.or.id/ppci-berganti-nama-menjadi-ppdi.html>, diakses pada 29 Januari 2018.

<sup>52</sup> Ppdi.or.id, 2012. “Profil PPDI”, dalam <https://ppdi.or.id/profil-ppdi>, diakses pada 29 Januari 2018.

<sup>53</sup> Ppdi.or.id, 2012. “Sejarah PPDI” dalam <https://ppdi.or.id/sejarah>, diakses pada 29 Januari 2018.

## 2. Visi dan Misi PPDI<sup>54</sup>

### a) Visi

Terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek Kehidupan dan Penghidupan.

### b) Misi

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan isu disabilitas.
- 2) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- 3) Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.
- 4) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
- 5) Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
- 6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

## 3. Usaha

Untuk melaksanakan tugas pokok PPDI menjalankan usaha-usaha:<sup>55</sup>

- a) Untuk melaksanakan tugas pokok PPDI menjalankan usaha-usaha: menggalang dan mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan dana yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- b) Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dengan dan antar anggota serta dengan masyarakat dan pemerintah.

<sup>54</sup> Ppdi.or.id. 2012. "Sejarah PPDI" dalam <https://ppdi.or.id/sejarah>., diakses pada 29 Januari 2018.

<sup>55</sup> Musyawarah Nasional VI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia : BAB III/Pasal 11

- c) Bersama masyarakat dan pemerintah mendorong, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri, harga diri, kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar secara mandiri dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berpartisipatif dalam pembangunan nasional.
- d) Memperjuangkan dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur perikehidupan penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serata mengawal pelaksanaan sosialisasi dan implementasi.
- e) Memperjuangkan penciptaan lingkungan yang kondusif, aksesibilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas agar terwujud kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam arti yang seluas-luasnya.
- f) Berperan aktif dalam segala kegiatan –kegiatan disabilitas ditingkat internasional.
- g) Menjadi anggota organisasi disabilitas internasional serta berperan aktif dalam mengangkat dan mengadopsi isu-isu internasional tentang disabilitas.

#### **4. Struktur DPC PPDI Kota Semarang**

- a) Penasehat : 1. Wali Kota Semarang  
2. Ketua DPRD Kota Semarang
- b) Pembina : Kepala Dinas Sosial Kota Semarang
- c) Dewan Pertimbangan  
Ketua : Basuki  
Sekretaris : Suyanto
- d) Dewan Pengurus Cabang  
Ketua : Linda Fatmawati (Leli)  
Wakil : Bintoro  
Sekretaris : Endah Sulistiowati  
Wakil Sekretaris : Sri Supriapti  
Bendahara : Stevia Pranoto  
Wakil Bendahara : Khomsih Jumiati

## 5. Makna Logo PPDI

Logo adalah suatu identitas untuk menggambarkan karakter dari suatu lembaga tersebut. Berikut adalah logo dan makna dari logo PPDI:

Gambar 1. Logo PPDI



Keterangan:

- a) Warna putih pada dasar lambang adalah menggambarkan kesucian dan kemurnian jiwa Penyandang Disabilitas.
- b) Warna biru pada segi lima adalah menggambarkan dinamika dan etos kerja PPDI.
- c) Segi lima adalah asas organisasi PPDI yang berasaskan Pancasila.
- d) Bintang adalah menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai implementasi dari pengharapan terhadap Jiwa dan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas.
- e) Padi dan kapas adalah menggambarkan tujuan PPDI yakni mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- f) Kursi roda Tuna Daksa, tongkat Tuna Netra. Alat bantu dengar Tuna Rungu dan Perlindungan Keterbatasan intelegensia Tuna Grahita adalah menggambarkan berbagai jenis ke Disabilitas yang menjadi anggota PPDI.

- g) Pita melambangkan kebersamaan dan segenap potensi Penyandang Disabilitas yang terikat erat pada keutuhan organisasi PPDI.

## 6. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang

Tabel 2. Banyaknya Penyandang Disabilitas  
Di Kota Semarang  
Tahun : 2014.<sup>56</sup>

Kecamatan/ <i>District</i>	Jenis Disabilitas						
	Tubuh	Tuna Netra	Mental	Tuna rungu	Ganda	Jumlah/ <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Mijen	66	66	58	49	14	253	
Gunungpati	40	22	25	0	0	87	
Smg. Selatan	48	33	68	35	40	224	
Banyumanik	60	52	48	42	31	233	
Gajahmungkur	28	35	35	6	37	141	
Genuk	22	28	56	40	45	191	
Pedurungan	54	44	24	36	28	186	
Gayamsari	68	38	38	47	28	219	
Smg. Timur	42	25	17	33	34	151	
Candisari	42	38	33	30	24	167	
Tembalang	176	91	61	94	86	508	
Smg. Utara	46	179	48	124	63	460	
Smg. Tengah	17	41	31	41	31	161	
Smg. Barat	79	44	51	45	44	263	
Tugu	24	31	38	21	12	126	
Ngaliyan	50	39	36	51	11	187	
Jumlah/ <i>Total</i>	2014	862	806	667	694	528	3.557
	2013	862	806	667	694	528	3.557
	2012	862	806	667	694	528	3.557
	2011	758	390	980	526	94	2.748
	2010	378	192	245	214	97	1.126

### B. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang

Persatuan penyandang disabilitas Indonesia berupaya untuk memberdayakan para penyandang disabilitas dengan cara memenuhi hak-hak yang mereka belum dapat. Penyandang disabilitas membutuhkan sebuah dorongan, *support* yang mereka dapat agar para penyandang disabilitas memiliki motivasi serta kepercayaan diri lebih untuk menjalani

<sup>56</sup> Lihat Kota Semarang dalam Angka 2014, hlm., 367-368

kehidupan secara baik dan mandiri. PPDI sebagai salah satu pelaku pemberdayaan berupaya mendorong dan membuat para penyandang disabilitas agar mampu menjalani kehidupan menuju kearah kemandirian, karena kemandirian sebagai salah satu indikator suatu keberdayaan. Salah satu indikator suatu keberdayaan adalah adanya kepercayaan diri, oleh karena itu DPC PPDI Kota Semarang mengawali pemberdayaan penyandang disabilitas dengan menumbuhkan kepercayaan diri agar mampu mengendalikan diri dan orang lain.

Melihat kondisi para penyandang disabilitas khususnya disabilitas Kota Semarang PPDI menemukan berbagai macam kekurangan, ketidakberdayaan seperti banyaknya para penyandang disabilitas yang masih belum mendapat hak, kemiskinan yang mereka alami serta banyak penyandang disabilitas yang masih dikucilkan lingkungan sekitarnya, dan banyak disabilitas yang belum mempunyai keterampilan untuk mereka jadikan sebuah modal demi menjalani kehidupan mereka secara lebih mandiri. Oleh karena itu PPDI lewat program kerjanya ingin membuat perubahan perilaku penyandang disabilitas dalam berbagai aspek baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang dibutuhkan serta berguna bagi para penyandang disabilitas demi meningkatkan kualitas diri mereka, sehingga para penyandang disabilitas mempunyai daya dalam kehidupannya.

Dalam pemberdayaan, salah satu tugasnya adalah membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang, dan tantangan yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.<sup>57</sup> PPDI berperan aktif dalam memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang penyandang disabilitas. Dunia berubah, keadaan masyarakat pun ikut berubah. Oleh karena itu pemerintah serta agen-agen pemberdayaan formal dan nonformal dituntut untuk bisa menganalisis dan memecahkan serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada umumnya serta kepada penyandang disabilitas pada khususnya. Berikut adalah informasi yang peneliti dapatkan.

Dengan Ibu Leli (ketua DPC PPDI Kota Semarang) menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan PPDI berfokus pada kewiraswastaan, dengan menggunakan ekonomi kreatif memanfaatkan daur ulang bahan-bahan disekitar lingkungan yang tidak terpakai seperti daur ulang koran bekas, bungkus kopi dan lain-lain. PPDI memberikan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Di Rowosari yang

---

<sup>57</sup> Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67

disabilitasnya lebih berat PPDI memberikan terapi-terapi bermain karena di Rowosari kebanyakan disabilitasnya tergolong berat. DPC PPDI Kota Semarang pun memberikan berbagai bantuan-bantuan yang dibutuhkan seperti pemberian kursi roda. Berikut penuturannya:<sup>58</sup>

“Pemberdayaan berfokus pada wiraswasta, daur ulang Koran, bungkus kopi, di tembalang ada dua kecamatan Meteseh dan Rowosari, yang di Meteseh kebanyakan sudah remaja, disana kebanyakan difabelnya tuli istilahnya rungu wicara. Jika di Rowosari difabelnya memang agak berat banyak macam-macamnya ada yang hedrosepalus dan lain-lain jadi di Rowosari kita disana kebanyakan memakai terapi-terapi bermain, seperti bermain bola, bola yang besar bola terapi, seperti memang main-main padahal itu sebenarnya adalah terapi bermain, terus masukkan lubang kancing dan lain-lain. Istilahnya itu terapi sensorik, jadi sistemnya kita bermain, misalnya balok segitiga dimasukan di lobang segi tiga. Seperti itu. Jadi kita pemberdayaannya itu menyesuaikan kebutuhan disitu. Jika di Meteseh kita fokuskan ke pemberdayaan jika di Rowosari jika di Rowosari kita fokuskan pada terapi-terapi bermain.”

“Program bantuan kita kerja sama dengan OHANA, bantuan kursi roda, dengan pengukuran kursi roda khusus, satu kursi roda itu paling murah harga 20-80 juta itu kita beri gratis dengan sistem sewa, sewa di sini artinya jika sudah tidak nyaman diganti. Kita fokuskan pada penderita punggung. Karena jika menggunakan kursi roda biasa...apa namanya...nanti lama kelamaan akan mempengaruhi tulang belakang. Jadi bantuan ini khusus untuk ABK. Di situ nanti harus diukur jadi tidak bisa sembarangan.”

“Jadi di PPDI itu sudah membuat tiga kelompok di Meteseh namanya karunia ilahi, kalo di Rowosari itu Ar-Rizki, jika di Pedurungan itu Kuncup Mekar. Mau bentuk kelompok di banyu manik belum nyampe. Daur ulang tadi kita sudah bawa ke bazar-bazar, PPDI sementara ikut bantu memasarkan produk-produknya.”

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah munculnya kemandirian dalam diri penyandang disabilitas, strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto secara tidak langsung seperti a. Motivasi b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan c. Manajemen diri d. Mobilisasi sumber daya e. Pembangunan dan pengembangan jejaring<sup>59</sup> sudah diterapkan pada pemberdayaan yang dilakukan oleh DPC PPDI Kota Semarang. Analisis kebutuhan diperlukan dalam pemberdayaan agar pemberdayaan selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Maka dari itu PPDI berusaha mencari masalah-masalah yang masih menjadi kendala para penyandang

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 30 Januari 2018

<sup>59</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 104

disabilitas di Kota Semarang. Di Meteseh contohnya banyak pelatihan-pelatihan contohnya pelatihan yang sudah dilakukan adalah pelatihan membuat, pelatihan *handicraft* dan lain-lain. Jika dalam satu kecamatan sudah terbentuk kelompok sudah mempunyai struktur, serta pemberdayaan di sana sudah berjalan kegiatan *intern* akan dipasrahkan kepada ketua dan pengurus di sana. Lalu PPDI memfokuskan pada kelompok-kelompok lain yang masih butuh bimbingan. Pada kegiatan ekonomi kreatif penyandang disabilitas di Meteseh, hasil produksi yang telah mereka buat dipamerkan di even-even kegiatan seperti bazar. Lalu ada juga yang dipasarkan lewat *online*. Hasil produksinya seperti pot, tempat pencil dan lain-lain. Berikut penuturannya :<sup>60</sup>

“Di Meteseh itu sudah banyak pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan membuat, *handicraft*, dan lain-lain. Jika sudah jalan di kelompok-kelompok itu lama kelamaan nanti saya lepas. Jika sudah ada kelompok sudah ada struktur di sana, sudah ada pelatihan yang jalan, sudah ada bantuan alat terapi, lama kelamaan saya lepas pelan-pelan dan kegiatan *intern* nanti saya pasrahkan kepada ketuanya. Nanti gantian saya mengurus kelompok-kelompok lain (yang belum berdaya), saya dulu juga pernah mengadakan pelatihan-pelatihan kursus komputer gratis untuk para difabel, ya cuma pengenalan-pengenalan dasar bagaimana menggunakan kursor, cara mengetik. Menyalakan komputer, mematikan komputer, seperti itu mas.”

“Di Meteseh itu pemberdayaan ekonomi juga untuk kemandirian, hasil dari produksi mereka nanti di taruh dipameran-pameran. Nanti hasil produksinya dijual di pameran-pameran. Terus kita bantu lewat marketing online kaya gitu. Cuma kan kalo marketing online kan kali difabelnya bisa internet. Jadi mereka kebanyakan ya membuat terus pemasarannya mereka kesulitan. Kebanyakan teman-teman difabel itu bisa membuat bisa memproduksi tapi mereka tidak tahu cara memasarkannya. Belum ada pelatihan dari hulu kehilir gitu lho mas...hasil karyanya itu ya kaya hasil daur ulang kertas gitu jadi kaya tempat pot, tempat pencil. Jadi PPDI sekarang bantuannya bukan pada *intern* kegiatan sekarang bantuannya jika ada bazar-bazar kita bantu pameran. Jika ada even atau peringatan kita ikut. Pemasaran online nanti kita posting kita foto produknya, teman-teman difabel kita yang posting, jadi pemasaran kita sementara seperti itu. Jadi temen-temen yang sudah buat kerajinan tangan ya kita share di grub-grub, grub facebook kita posting juga, disahre di whatsapp juga. Kesulitan saat menghimpun teman-teman disabilitas itu juga karena dihambat dari orang tuanya juga seperti “kumpul ngeniku entok opo tho buk, entuk duet rak” “paling kumpul-kumpul tog” jadi ada mainset bahwa disabilitas adalah selalu butuh dikasihani dan diberi bantuan. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena kadang memang ada difabel yang kategori berat. Kan ada tiga kategori difabel ya mas ada difabel mandiri, ada rawat jalan, ada yang berat.”

DPC PPDI Kota Semarang dalam pemberdayaannya tidak sendiri, dalam pelaksanaan advokasi dibantu dengan PSM (Petugas Sosial Masyarakat) dari TKSA (Tenaga

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 30 Januari 2018

Kesejahteraan Sosial Masyarakat). Dari PSM lah PPDI mendapat info tentang permasalahan sosial masyarakat khususnya permasalahan difabel. Setelah PSM koordinasi dengan PPDI. Tahap selanjutnya adalah melakukan *Home Visit* bersama dengan PSM ke keluarga yang mempunyai anggota penyandang disabilitas. Dari kunjungan *Home Visit* itu PPDI menganalisis anggota penyandang disabilitas mulai dari jenis penyandang disabilitas, bagaimana lingkungan sekitarnya, lalu menganalisis bagaimana keluarga memperlakukannya. Dari situ PPDI memberikan gambaran dan memberikan pemahaman serta contoh kepada keluarga bagaimana cara merawat anggota penyandang disabilitas secara benar. Data yang telah didapat lalu diserahkan ke kelurahan sampai ke kecamatan agar ditangani lebih lanjut.

“Tiap kecamatan itu ada PSM (petugas sosial masyarakat) tiap kecamatan ada TKSA (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat), dari Dinas Sosial nanti masuk ke TKSA itu nanti turun ke PSM, TKSA itu jika ada permasalahan sosial masyarakat itu yang *men-handle* TKSA lah kakinya itu namanya PSM. Khusus untuk pengelompokan difabel saya pakainya PSM. Dari PSM itu nanti kita tahu masalah-masalah difabel disetiap kecamatan contoh masalah difabel Rowosari, difabel Rowosari kan kebanyakan difabel mental, *down syndrome*, daksa, netra juga ada katakanlah campuran gitu mas. Nanti dari PSM itu kan kordinasi ke saya “Mbak Leli ada kasus seperti ini katakana lah ada kasus *down syndrome*, kan kebanyakan orang melihat kasus itu seperti idiot, mukanya sama semua. Lalu dari situ kita datang. Saya datang bersama PSM untuk *Home Visit*, dari situ kita tahu bagaimana keluarganya terus kita mengetahui keluarga ini memperlakukan anak difabel ini, lingkungannya bagaimana, RT RW tahu apa enggak, kadang kana da RT yang tidak tahu. Dari situ kita dapat data, data yang valid kita kasih ke pak lurah. Ke pak lurah nnti kita blg “pak ini ada kasus *down syndrome* dan belum ditangani” dari *home visit* tadi kita kasi advokasi atau pendampingan hukum. Lah tadi advokasinya itu seperti tadi pendekatan ke keluarga setelah mendapat data langsung dibawa ke kelurahan terus sampai ke kecamatan itu namanya advokasi. Nah disitu kita sudah masuk ranah advokasi kita tahu kenapa ada masalah seperti itu, contoh jika ada anak *down syndrome* itu kenapa? Oh karena orang tuanya menikah diumur yang tua, atau karena kelebihan gen kayak gitu, atau lingkungan yang tidak mendukung dari situ kita bisa kasi *treatment-treatment* apa yang dibutuhkan sama difabel tersebut.”<sup>61</sup>

Pelatihan-pelatihan yang diadakan DPC PPDI Kota Semarang di dalam kelompok yang telah terbentuk bertujuan untuk memberi bekal kepada para penyandang disabilitas agar mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus. Diawal berdirinya kelompok penyandang disabilitas tersebut, PPDI berusaha mencari pelatih-pelatih keterampilan guna menunjang kegiatan yang ada. Setelah kelompok sudah berjalan pelan-pelan PPDI melepas

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 27 April 2018

dan memberikan tugas kepada ketua kepengurusan di tiap-tiap kelompok. PPDI juga ikut andil dalam pelestarian Bahasa Isyarat Indoneisa atau Bisindo yang dilakukan oleh GerkatIn. Berikut penuturannya :<sup>62</sup>

“Di tiap-tiap kelompok yang telah dibentuk kita mengadakan pelatihan-pelatihan, kita PPDI mencari pelatih untuk memberikan pengetahuan baru, apa namanya gini saat kita sudah membuat kelompok kita sudah mendapat kan ruang kita *support* dari belakang, istilahnya tanggung jawab sudah kita mulai pasrahkan kepada ketuanya karena kita (PPDI) tidak mungkin atau tidak bisa selalu mendampingi terus menerus. Nanti Mbak Khomsih (ketua kelompok difabel Meteseh) kita *support* dari belakang “Mbak ini kita ada narasumbernya”

“Dulu waktu kita kerja sama dengan GerkatIn untuk mensosialisasikan Bisindo kan istilahnya itu kayak bahasa isyarat itu cuma untuk orang-orang tertentu saja hanya untuk orang tuli ya tuli tog gitu mas. Kan kalo orang biasa kan lihatnya mereka lapo ngeniku aku orak paham. Terus Mbak Bebe, koh Aming, bu Yukti itu tho “ gimana kalo ngadain pelatihan Bisindo?” yasudah kita fasilitasi, yah maksudnya kita saling bantu. Mulai konsepnya pelatihnya, narasumbernya. Kan kalo budaya tuli kan Cuma tuli saja yang tahu nah kita belajarnya pada mereka.”

“Programnya ya itu melakukan pendampingan, melakukan advokasi, yang baru-baru ini ibu baru melakukan pembagian Al-Qur’an braille kepada teman teman netra secara gratis. Dan bantuan ini kami khususkan untuk teman teman netra yang sudah bisa braille. Dan ini tingkat jawa tengah mas.”

Ibu Khomsih ketua di kelompok disabilitas Karunia Ilahi (Meteseh) menjelaskan bahwa kegiatan di Karunia Ilahi dalam seminggu ada dua kali kegiatan, di sana anak anak disabilitas dilatih keterampilan dengan bermain dengan alat-alat terapi khusus serta dikasih fisioterapi dari PPRBM. Jika pemberian keterampilan di Meteseh Bu Khomsih menjelaskan bahwa mengandalkan para relawan seperti SULBI (Sahabat Unik Luar Biasa), dari SULBI para penyandang disabilitas diajarkan keterampilan gantungan kunci, daur ulang koran bekas. Tujuan dari pelatihan itu supaya anak-anak disabilitas menjadi mandiri khususnya penyandang disabilitas dewasa yang mampu menangkap pelajaran dari pelatih. Berikut penuturannya :<sup>63</sup>

“Di sini sudah terbentuk kelompok ya mas. Namanya Karunia Ilahi itu kadang kita mengadakan pertemuan seminggu dua kali, pertemuannya setiap hari selasa dan kamis jam 4 sore. Itu anak disabilitas yang dewasa dilatih untuk keterampilan diajari untuk mandiri sebisa mungkin. Untuk yang anak-anak diajari main-main untuk

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 27 April 2018

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Khomsih (Ketua Kelompok Disabilitas Karunia Ilahi Meteseh), tanggal 21 April

edukasi dengan fisioterapi. Fisioterapinya kita kerja sama dengan PPRBM, PPRMB itu yang menyediakan untuk jasa tenaga terapisnya.”

“Untuk keterampilan kita mengandalkan relawan relawan mas. Kebetulan kita ada relawan dari Sulbi, Sulbi Sahabat Unik Luar Biasa iya itu yang selalu membantu kita, untuk keterampilannya diajari macem-macem, ada gantungan kunci, daur ulang koran bekas yang dilinting-linting. Sampai sekarang masih aktif.”

“Kita belajar keterampilan dari Sulbi itu semua bahan awalnya dari mereka yang menyediakan, tapi lama kelamaan kita ikut mencari bahan juga untuk anak-anak. Hasil dari produk tangannya yang dulu-dulu sudah pernah kita ikutkan ke pameran-pameran, bazar. Untuk sekarang yang gantungan kunci dan lain-lain itu kita kumpulkan kita rencana kita packing sambil kita pasarkan lewat online, kita tawar-tawarkan untuk misalkan ada acara nikahan untuk *souvenir* rencana kedepannya mas.”

“Tujuannya dari pelatihannya itu supaya anak-anak difabel yang dewasa supaya mandiri mas. Mungkin di rumah dia tidak bekerja ya. Mungkin sambil berlatih kita sambil dia bisa punya penghasilan sendiri nantinya.”

Selain Advokasi dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok disabilitas, PPDI juga bekerja sama dengan Gerkatin sebagai organisasi yang berada di bawah payung PPDI. PPDI mengetahui kebutuhan para tuli. Gerkatin mempunyai visi agar para penyandang tuli dapat berkomunikasi dengan para nondisabilitas dengan cara menyebarkan Bisindo. PPDI ikut andil dalam pelestarian bahasa isyarat tersebut dengan cara mengadakan pelatihan Bisindo. Berikut wawancara dengan Mas Fitra Ketua Gerkatin Kota Semarang, menjelaskan bahwa agar komunikasi dengan para nondisabilitas berjalan lancar Bisindo harus dikenalkan secara terus menerus kepada masyarakat. Mulai dari mengadakan pelatihan-pelatihan, hingga mengenalkan bahasa isyarat ke sekolah-sekolah. Pengenalan Bisindo sangat perlu karena bahasa isyarat yang sebelumnya dipakai adalah SIBI dinilai lebih sulit dipahami bagi tuli bahkan para nondisabilitas. Mas Fitra menjelaskan bahwa pembelajaran bagi para nondisabilitas mulai dari angkat, terus cara berterimakasih dan terus menerus ketahap selanjutnya. Berikut penuturannya :<sup>64</sup>

“Tujuan dari kelas Bisindo agar Bisindo berkembang, untuk pelajar agar tahu tentang bahasa isyarat untuk komunikasi orang tuli dengan orang biasa agar nyambung. Jika tidak bisa bahasa isyarat nanti tidak nyambung. Jika kita kerja di kantor atau di mana jika ada orang dengar (orang yang bisa mendengar) bisa bahasa isyarat kita bisa nyambung dengan mereka. Kalau tidak nyambung sulit. Nanti bisa salah paham. Makanya buka kelas bahasa isyarat 10 minggu, dalam seminggu pertemuan dua kali, setiap malam sabtu dan minggu habis maghrib.”

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Mas Fitra (Ketua Gerkatin Semarang), tanggal 14 April 2018

“Di dalam kelas Bahasa, Pertama belajar abjad dahulu tanpa suara. Jika sudah OK. Dilanjut dengan 1 2 3 angka, terus cara komunikasi, cara berterima kasih dan terus seperti itu secara bertahap. Nanti bisa belajar bersama dengan yang lain. Belajar di depan kaca, belajar cara ber ekspresi.”

“Dulu kita pakainya Sibi tapi sulit untuk dipahami, sulit untuk berkomunikasi. Jadi tuli membuat bahasa sendiri yaitu Bisindo. Sekolah sekolah belum menggunakan Bisindo. Sibi itu yang membuat adalah orang dengar (orang yang bisa mendengar) bukan teman tuli itu sendiri. Tuli buat Bisindo untuk disebarluaskan.”

Lebih lanjut wawancara dengan Mbak Ira (Ketua Bahasa Isyarat Indonesia DPC Kota Semarang) menjelaskan bahwa pelatihan mulai dari abjad, lalu angka, warna dan lain-lain. Mbak Ira menjelaskan bahwa jika ingin paham lebih baik dengan bahasa isyarat harus sering-sering kumpul dengan para tuli agar cepat menguasai. Berikut penuturannya :<sup>65</sup>

“Pertama kali masuk awal kelas untuk komunikasi dengan tuli, untuk paham ngomong apa. Tahap pertama. Sampai tahap pertemuan ke 10. Materi beda-beda pertama abjad, dua angka, terus warna dan lain-lain. Yang ngajar harus tuli, karena tuli punya budaya kalo tuli yang ngajar nanti agar lebih paham. Kelas Bisindo ada yang dari pemerintah, umum, mahasiswa, sekolah menengah bisa, macem-macem, tergantung niatnya yang mau belajar silakan.”

“Untuk teman tuli itu kelasnya beda, yang teman-teman dengar itu belajar yang mudah-mudah dari dasar dulu. Untuk kelas tuli itu materinya lebih dalam lagi. Tapi kita fokus teman dengar dulu karena lebih banyak materinya. Kalo tuli ada materinya tapi berbeda. Teman-teman tuli harus sering sering kumpul agar cepat menguasai Bisindo, kalo tidak aktif tidak bisa. Materi kepada teman tuli itu berbeda tergantung dengan *background* pendidikannya juga. Teman tuli ada yang tidak paham tetnang bahasa Indonesia juga ada, tidak bisa membaca juga ada, pendidikan nol juga ada. Makanya meterinya tergantung pada *background* teman-teman tuli.”

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang**

Saat merencanakan suatu program kerja harus berlandaskan kebutuhan pada sasaran yang akan diberdayakan. Tentu dalam melaksanakan pemerdayaan dalam suatu masyarakat harus ada dampak yang dirasakan oleh mereka. Oleh karena itu faktor pendukung serta penghambat harus diketahui agar memberikan gambaran kondisi nyata dari proses pemberdayaan tersebut secara menyeluruh serta mempermudah dalam evaluasi pemberdayaannya. Menurut Ibu Leli menjelaskan bahwa penghambat dalam pemberdayaan DPC PPDI Kota Semarang adalah kurangnya informasi yang di dapat dari pemerintah

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Mbak Ira (Ketua Bisindo Semarang), tanggal 14 April 2018

setempat. Yang kedua adalah pendidikan orang tua mengenai dunia disabilitas dinilai masih sangat kurang sehingga mereka tidak tahu jika anggota keluarga mereka ada yang termasuk disabilitas. Yang ketiga adalah masih banyaknya keluarga menolak serta malu mengakui anggota keluarga mereka adalah seorang disabilitas. Dari penolakan tersebut membuat advokasi dari PPDI menjadi terhambat dan tidak bisa berjalan lancar sesuai rencana. Berbagai masalah itupun menjadi penghambat untuk DPC PPDI Kota Semarang untuk membentuk kelompok disabilitas di tiap-tiap kecamatan dan pemberdayaannya akan terhambat. Sekali pun para anggota keluarga menerima fakta anggota keluarga mereka ada yang seorang penyandang disabilitas. Namun masih berfikir ulang untuk memberarkan anggota disabilitas tersebut untuk mengikuti kegiatan kegiatan di luar rumah mereka. Karena terlalu khawatir dan menganggap anggota keluarga tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Berikut data yang dihimpun :<sup>66</sup>

“Saat PPDI membentuk kelompok yang menjadi penghambat adalah pemerintah setempat tidak tahu jika di daerah mereka ada difabel, saya tidak menyalahkan sepenuhnya pemerintah karena di lapangan memang banyak kendala, salah satunya adalah pendidikan orang tua yang tidak mengerti, maksudnya itu mereka mengira anak mereka kerasukan, masih meyakini hal-hal mistis, jadi ibunya itu tidak tahu jika anaknya itu difabel atau anak-anak *down syndrome* itukan jika orang tidak tahu kan mengiranya mereka itu kerasukan atau gila. Lalu PPDI itu kasih Advokasi pelan-pelan jika anak itu adalah difabel, kita kasih pengetahuan. Jadi ada difabel yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan, seperti saya jika saya duduk kan tidak ada yang tahu jika saya adalah difabel. Ya tantangan kita saat membentuk kelompok itu ya berat. Pak lurah saja kadang saya bawa, saya eret-eret. Bahkan sempat dapat penolakan dari keluarga karena mereka malu.”

“Banyak program-program kedepan program kita banyak sekali. Tapi program kita besok harus program yang sudah benar-bener apa istianya programnya itu harus bisa menjangkau keluar, karena selama inikan pemberdayaan kita kan masih sekitar itu, seperti menumbuhkan kepercayaan diri, kasih pengetahuan kepada orang tua yang punya anak difabel karena malu “aku gak punya anak difabel” jadi gini kita datang ke rumahnya bilang “bu nuwun sewu kita dari PPDI, kata Pak RT ibu punya anak difabel..” “ndak. Saya ndak punya anak difabel.” “aku rak due anak cacat!) Seperti itu. Jika sudah terbentuk kelompok sudah enak, tapi jika jika baru membentuk banyak kendala, karena mikirnya mikirnya mereka (para orang tua yang punya anak difabel) “mengko aku ntok opo melu iku” “mengko entok bantuan opo” ya selalu begitu. Karena jika mas anas lihat difabel selalu identik dengan objek yang selalu diberi bantuan saja, dan akhirnya membentuk mental difabel menjadi peminta-minta. Kita (PPDI) sekarang sedang memperjuangkan kesetaraan hak. Kedepan 15 komunitas difabel di Semarang yang kita payungi itu akan mengadakan FGD dengan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 30 Januari 2018

12 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan memperjuangkan kartu disabilitas, kartu disabilitas itu. Jadi kita besok meja bundar dengan pemerintah, bagaimana peran pemerintah itu seperti apa.”<sup>67</sup>

“Kendala saat advokasi, tidak semua keluarga menerima jika anaknya dikatakan difabel. Bahkan sampai pak lurah saya bawa dengan PSM sampai rumah itu ditutup pintu, jadi keluarganya malu. “anakku orak difabel” “anakku mung rodo angel dungkono” padahal info yang kita dapat dari situ dari sekitar lingkungan rumah tersebut anak tersebut itu tuli, tapi bisa ngomong. Jadi mungkin anggapan orang tua itu anaknya keterlambatan bicara. Padahal anaknya sebenarnya adalah tuna wicara dan tuli. Terus akhirnya ada kendala itu. Ada banyak kasus sampai dipasung itu dikira kerasukan. Jadi saya dengan PSM itu masuk ke ruma itu mengetahui oh tempatnya seperti ini, bahkan tempatnya kumuh banget sampai tidak layak huni ya begitu tantangannya, ya begitu ada yang ngira *magic*, ada yang ngira kutukan, dikira dikirim teluh seperti itu. Setelah itu kita bentuk kelompok ada pak RT yang anaknya kebetulan difabel dan dia menerima kita ajak buat kelompok. Karena ada mainset yang salah tentang difabel adalah objek mencari bantuan kita buatlah kelompok untuk diberdayakan. Fisioterapi ada dua, terapi sensorik dan motorik. Dan saat saya melakukan terapi saya gabung semua, da nada alat terapinya ditiap-tiap kelompok saya tinggali alat terapi untuk mereka, alatnya berupa motorik dan sesorik.

“Hambatannya iya itu, penolakan dari keluarga, mainset orang terhadap difabel, difabel itu cukup dikasihani. Cuma sebagai objek untuk dikasihani. Pemberdayaan difabel itu tidak terlepas dari lingkungannya, jika ingin memberdayakan difabel ya harus melalui lingkungannya juga. Mulai dari yang terdekat yaitu keluarganya. Minimal dari orang tua, orang tua mampu menerima dan menyadari bahawa anaknya difabel dan tahu caranya mendidiknya tahu cara merawatnya, dan anaknya membu membuat karya itu adalah suatu *support* yang luar biasa. Lingkungan sekitar ruma itu cuma sebagai pendukung. Lalu dari pemerintah, pemerintah kita tidak akan tahu jika kita difabel kalau istilahnya kita tidak dodok sek “pak ini loh saya ini difabel punya karya” itu pemerintah gak akan tahu. Dan hambatan lainnya itu mas kadang ada anggota organisasi yang tidak patuh sama ketuanya mas. Yo ngeniku dikandani rak iso. Makane enak dadi anggota wae mas dari pada ketua hehe”

Lebih lanjut Ibu Leli menjelaskan bahwa pemberdayaan mempunyai manfaat bagi para penyandang disabilitas salah satunya adalah ada pada segi ekonomi dari pelatihan yang ada PPDI berharap para penyandang disabilitas mempunyai keterampilan sehingga mereka bisa mandiri secara finansial serta mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Berikut penuturannya :<sup>68</sup>

“Manfaat dari pemberdayaan, ini dari segi ekonomi ya mas, gini kan jika ada pemberdayaan kan paling tidak si difabel bisa mandiri. Mandiri dalam arti seperti ini

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Leli (Ketua PPDI Kota Semarang), tanggal 27 April 2018

ada dua mandiri secara ekonomi atau mengurus finansialnya sendiri yang kedua adalah mandiri dalam hal mengurus dirinya sendiri. Nah itu yang kita ajarkan. Terkecuali difabel yang rawat karena difabel rawat tidak bisa apa-apa nah tugas kita adalah merawat seumur hidup. Yang dari sosial itu kita menunjukkan bahwa kita itu sama, difabel itu iya punya kemampuan dan kualitas yang sama tetapi kita disebut difabel karena keterbatasan lingkungan. Maksud dari lingkungan adalah aksesnya. Kayak mas anas kan bisa naik tangga cepet saya juga bisa tapi pelan-pelan. Tapi kan sama, sama sama bisa naik tangga gitu lo. Dalam hal politik, difabel juga punya hak politik Cuma memang kita beberapa akses juga. Contohnya masuk dalam KPU kan kalo temen-temen kursi roda pengen masuk kan tidak bisa kurang dari satu meter. Padahal kalau pakai kursi roda kan minim 80 cm setidaknya pintu masuk KPU itu minim 1 meter. Terus bagaimana jika untuk temen-temen yang tidak punya tangan? Itu mejanya jangan ketinggian, kalo gak ya dikasih apa namanya dikasi bancia. Terus ke teman netra, kan teman netra g bisa lihat ya dan kita punya brailed an dia paham gitu loh. Nantikan kertasnya juga bisa dikasi braile kan bisa, itu dari politik. Dari budaya, kebudayaan seni kan mas anas pernah lihat ada penari difabel yang tuli tu dia kan cantik bisa nari seperti itu. Kita bisa tapi terhambat pada aksesibilitasnya. Jadi yang membuat berbeda difabel dengan nondifabel itu karena lingkungannya terutama aksesnya. Dan kita menyamakan hak antara hak antara difabel dan nondifabel, kita punya hak sama kita punya kesempatan yang sama walupun dengan cara yang berbeda.”

Lebih rinci Ibu Khomsih menjelaskan bahwa pemberdayaan mempunyai manfaat bagi penyandang disabilitas. Ketika anak penyandang disabilitas yang tidak mengikuti dengan yang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dalam kelompok mempunyai perbedaan yang terlihat jelas. Anak-anak yang mengalami pemberdayaan lebih bisa bergaul, lebih mempunyai sikap terbuka terhadap hal-hal baru pada lingkungan sekitarnya. Mereka lebih terlihat percaya diri. Dari masyarakat sekitar pun mendukung adanya kegiatan pemberdayaan disabilitas, perangkat desa pun ikut men *support* kegiatan demi kegiatan yang ada. Serta banyaknya relawan yang siap membantu jadi faktor pendukung yang sangat dibutuhkan. Penghambatnya adalah soal waktu kesibukan masing-masing keluarga tidak bisa mendampingi anggota keluarga disabilitas untuk mengikuti acara. Berikut penuturannya :<sup>69</sup>

“Ya jika ngomong manfaat sih, kalo dari pendampingnya mas ya ndak seperti dulu-dulu. Mungkin dulu dianya sering mengurung diri di rumah merasa tidak ada temen kalo sekarang kan mungkin banyak ya, dia sekarang merasa dia tidak sendiri. Menjadi agak lebih PD.”

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Khomsih (Ketua Kelompok Disabilitas Karunia Ilahi Meteseh), tanggal 21 April 2018

“Faktor pendukungnya dari lingkungan dari masyarakat, bahkan dari kelurahan juga mendukung, dkk, mkk, dari teman-teman relawan juga masih *support* dengan meluangkan waktunya.”

“Faktor penghambatnya kadang dilingkungan juga masih ada yang tidak menerima. Kadang terhambat waktu juga mas. Dari pemerintah juga sudah tahu dari dinsos pernah kesini.”

“Relawan dari Sulbi, USM, Unisulla, banyak sih mas dari UPGRIS juga ada. Unnes juga mengasih pelatihan. Yang terdata disini sekitar kurang lebih 38. Di sini anak-anak disabilitasnya macem-macam sih mas. Kebanyakan yang besar itu rungu wicara. Anak-anak banyak yang hiperaktif. Istilahnya daksa juga ada.”

Mas Fitra menjelaskan bahwa kendala saat melakukan program kelas Bisindo pertama kali adalah masalah penggunaan tempat, tempat yang nyaman serta tidak terlalu jauh dari para peserta, serta waktu. Waktu juga menentukan banyak tidak peserta kelas Bisindo dalam mengikuti kelas. Karena jika tidak mengikuti secara terus-menerus akan mudah lupa, karena bahasa harus dipelajari terus menerus. Berikut penuturannya :<sup>70</sup>

“Dulu kita menggunakan tempat-tempat di CFD, kadang buat kelas disana banyak yang datang. Tapi jika tidak ada kelas nanti lama-lama lupa. Makanya bahasa harus diasah terus-terus bahasanya. Nanti bisa menjadi penerjemah di depan. Terus kita buka kelas pertama kali di RRI dan responnya OK. Informasi kelas Bisindo menyebar lewat WA dikasi tahu yang lainnya. Ada facebook dan lain-lain. Pendukungnya ada di PusBisindo Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, dari PusBisindo mereka menginfokan buat kami untuk membuka kelas ditiap-tiap daerah. Dulu sebelum kelas diinfokan tidak ada yang mendukung tidak apa-apa. Akhirnya kita tetap usaha akhirnya kita dilihat hasil kita.”

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Mas Firta (Ketua Gerkatina Kota Semarang), tanggal 14 April 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian baik dari data hasil wawancara, dari pengamatan saat observasi oleh peneliti dan hasil dari dokumentasi yang didapat. Maka peneliti melakukan pembahasan mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang. Pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan data pada bab III (tiga) adalah bahan utama untuk pembahasan dalam bab analisa ini.

PPDI adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kepedulian akan nasib para penyandang disabilitas menjadi prioritas organisasi tersebut, kesetaraan hak dalam segala aspek yang seharusnya para penyandang disabilitas dapatkan secara utuhnya terus PPDI perjuangkan. PPDI Kota Semarang menyadari masalah-masalah penyandang disabilitas mencoba untuk merumuskan kebutuhan-kebutuahn yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas khususnya di Kota Semarang.

Dewasa ini Kota Semarang terus berbenah menjadi kota yang inklusif, dengan tujuan masyarakat inklusif sebagai tujuan akhirnya.<sup>71</sup> Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai pendekatan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusif, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

---

<sup>71</sup> Henny Warsilah. *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo Jawa Tengah*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 21

Harapan untuk menjadikan Kota Semarang sebagai kota inklusif memang baik. Namun sampai saat ini masih banyak para penyandang disabilitas yang terdiskriminasi dan terpinggirkan. Dari lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi wadah berekspresi mereka justru menunjukkan ketidakpedulian dan menganggap remeh bagi anggota keluarga yang mempunyai kondisi fisik yang berbeda. Padahal tak seorang pun individu boleh diperlakukan lebih tinggi atau pun lebih rendah baik secara hukum maupun secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kota Semarang terus bergerak menjadi kota yang inklusi namun masih memiliki banyak kendala antara lain tidak semua disabilitas mempunyai akses masuk ke sekolah LSB Negeri dengan mudah, pada kenyataannya banyak orang tua yang anaknya penyandang disabilitas mengeluhkan sulitnya mencari SLB untuk anaknya.

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas Indonesia khususnya di Kota Semarang seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan kebijakan program yang menyangkut para penyandang disabilitas. Dalam hal pembangunan disabilitas ketenagakerjaan juga terdapat fenomena terjadinya disabilitas pembangunan. Soal regulasi misalnya, hingga awal 2016 peraturan yang masih menjadi acuan adalah Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada penyandang cacat. Pada bagian Penjelasan Pasal itu ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 100 orang wajib mempekerjakan satu orang penyandang cacat. Pasal 28 dari UU No. 4 Tahun 1997 juga mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar 200 juta bagi pelanggar pasal 14.

Namun dalam kenyataannya belum nampak adanya upaya penertiban terhadap perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang belum merekrut penyandang disabilitas walaupun telah memiliki pekerja melampaui jumlah 100 orang. Selain itu belum ada bentuk penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.<sup>72</sup> Sulitnya penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan membuat para penyandang disabilitas harus memutar otak untuk mencari penghasilan agar menjadi manusia yang mempunyai daya untuk mandiri.

---

<sup>72</sup> Ledia Hanifa Amaliah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016), hlm. 57

Pada tahun 2014 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang berjumlah 3.557, data ini tidak bisa dikatakan valid karena terdapat kerancuan dalam pendataan. Salah satu kesulitan pendataan penyandang disabilitas adalah banyak warga yang menyembunyikan anggota keluarganya karena malu serta tidak mengakui anggota keluarga tersebut adalah seorang penyandang disabilitas. Tentu fakta tersebut masih terjadi hingga sekarang tidak hanya di Kota Semarang namun di daerah-daerah lainnya.

Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai pribadi yang tidak mampu, atau hanya menjadi hambatan saja dalam suatu masyarakat. Anggapan seperti itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena penyandang disabilitas sesungguhnya adalah pribadi yang utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai seorang manusia yang mempunyai hak yang sama. DPC PPDI Kota Semarang adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang diketuai Ibu Linda Fatmawati atau yang sering disapa sebagai Ibu Leli itu bertekad untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Karena pemberdayaan dilakukan untuk membantu para penyandang disabilitas yang tidak mempunyai daya, tidak percaya diri, atau yang memerlukan motivasi agar mampu bangkit dan mengatasi masalahnya sendiri. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memerlukan interaksi dengan sesama penyandang disabilitas dan nondisabilitas. Dalam bermasyarakat penyandang disabilitas dengan nondisabilitas harus memiliki kesetaraan untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama dan bahkan perbedaan bentuk fisik. DPC PPDI Kota Semarang dalam pemberdayaannya memperlakukan para penyandang disabilitas adalah anggota keluarga, sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis serta dapat membuat para penyandang disabilitas merasa nyaman. Sehingga akan lebih mudah untuk membuka diri dalam mengikuti kegiatan.

Ketidakterdayaan dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif, interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar :

1. Penilaian diri yang negatif. Ketidakterdayaan dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah

disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat.

2. Interaksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antar korban yang tertindas dengan sistem di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial di mana mereka berada.
3. Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekspresikan atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok *gay* atau lesbian dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.<sup>73</sup>

Penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dan sering dipandang rendah oleh lingkungan sekitarnya membutuhkan suatu dorongan agar mereka dapat percaya diri. Ibu Leli menjelaskan bahwa motivasi dapat berguna untuk penyandang disabilitas agar mempunyai kepercayaan diri, jika kepercayaan diri itu timbul maka otomatis rasa stress serta pandangan negatif terhadap diri sendiri akan berkurang.

Tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kekurangberuntungan kepada keberdayaan, yang artinya adalah adanya suatu peningkatan mutu kehidupan dalam suatu individu atau masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, hukum, atau politik, atau dalam berbagai hal yang masih ada ketidakadilan di dalamnya. Begitu pula pemberdayaan oleh DPC PPDI Kota Semarang yang memiliki berbagai tujuan mulia untuk meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas dengan cara mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas dari segala ketidakadilan dan dari segala diskriminasi yang mereka alami. DPC PPDI Kota Semarang perlahan membuktikan bahwa penyandang disabilitas tidak pantas dipandang sebelah mata karena penyandang disabilitas adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sama.

---

<sup>73</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 62

Menurut penuturan Ibu Leli DPC PPDI Kota Semarang mempunyai program yaitu pembentukan kelompok disabilitas di berbagai daerah yang karena dengan adanya pembentukan kelompok disabilitas dapat menunjang aktivitas penyandang disabilitas agar lebih efektif. Dengan pembentukan kelompok tersebut maka pemberdayaan akan lebih mudah dilaksanakan oleh para pekerja sosial atau pemerhati nasib disabilitas. Dari kelompok yang telah dibentuk tadi diadakan pemberdayaan-pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Ibu Khomsih sebagai ketua salah satu kelompok disabilitas menuturkan bahwa awal dari pembentukan kelompok itu adalah pendataan penyandang disabilitas, pembuatan struktur lalu merumuskan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas di sana. Pembentukan struktur dan program pemberdayaan bertujuan untuk memiliki kegiatan yang jelas yang harus dilaksanakan guna tujuan awal terbentuknya kelompok disabilitas tercapai.

Penyandang disabilitas dengan segala permasalahan yang masih dialaminya sekarang terus berjuang untuk membuktikan kepada masyarakat yang mempunyai daya atau kekuatan bahwa penyandang disabilitas mampu mandiri dan mempunyai daya walaupun dengan keterbatasan fisik serta hak-hak yang belum mereka dapat yang menghambat proses mereka belajar dan untuk mengasah kemampuan. PPDI menyadari bahwa masih banyak masalah disabilitas yang masih belum terselesaikan maka dari itu perencanaan yang baik mengenai kondisi disabilitas harus terlaksana, agar memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan cara melaksanakannya. Jika analisis keadaan penyandang disabilitas Kota Semarang telah selesai maka akan ditemukan berbagai masalah-masalah yang sedang dialami atau bahkan yang akan dialami mereka. Oleh karena itu <sup>74</sup>perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata (*real-problem*) yang telah dirasakan masyarakat (*felt-problem*), artinya, perumusan masalah hendaknya, dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata (*real need*) masyarakat, yang telah dirasakan oleh mereka.

---

<sup>74</sup> Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, (Bandung; Afabeta, 2012), hlm. 240

Pemberdayaan masyarakat ada 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, antara lain:<sup>75</sup>

1. Motivasi

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3. Manajemen diri

Setiap kelompok-kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemimpinan masyarakat. Pada tahap awal, pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

---

<sup>75</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 104

#### 4. Mobilisasi sumber daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

#### 5. Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan bagi para anggotanya membangun dan mempermudah jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

Setelah berbagai data dijelaskan di atas mengenai strategi pemberdayaan. Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan masyarakat yang mandiri dalam hal ini adalah masyarakat penyandang disabilitas tentunya dibutuhkan strategi pula, DPC PPDI Kota Semarangpun mempunyai strategi khusus dalam pemberdayaannya, karena keberhasilan suatu pemberdayaan juga karena adanya strategi itu pula. Dan strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang sudah sesuai dengan strategi yang dikemukakan oleh Edi Suharto sebagai berikut:

##### 1. Motivasi

Seorang penyandang disabilitas dalam kesehariannya cenderung menyendiri dari masyarakat sekitar. Hal itu disebabkan banyak faktor, sebagian faktor tersebut antara lain karena mereka sama sekali tidak terbiasa atau bahkan tidak tahu cara berinteraksi dengan dunia luar karena hambatan dari luar maupun dalam diri penyandang disabilitas, yang kedua adalah ada rasa malu dengan keterbatasan diri sehingga menutup diri dengan dunia luar, yang ketiga adanya pengekanan dari keluarga yang tidak membolehkan dirinya untuk keluar untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Oleh

karena itu Ibu Leli melakukan Advokasi terhadap penyandang disabilitas, Advokasi merupakan upaya-upaya dari, atau atas nama, individu-individu maupun kelompok yang diperlakukan secara tidak adil, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Banyak cara dalam mendefinisikan istilah advokasi. Advokasi dalam panduan ini secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini:<sup>76</sup>

- a) Serangkaian tindakan yang diarahkan kepada perubahan kebijakan, sikap, atau program dari berbagai jenis lembaga, pemerintah, maupun swasta.
- b) Menempatkan suatu masalah ke dalam agenda, memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut dan membangun dukungan tindakan untuk memecahkan masalah tersebut.
- c) Bekerja bersama dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan

Advokasi adalah salah satu solusi bagi penyandang disabilitas mengenai hak-hak yang mereka belum dapat. Melalui advokasi DPC PPDI Kota Semarang dapat mengetahui masalah penyandang disabilitas tersebut. Sebagai contoh Ibu Leli melakukan *home visit* ke rumah si penyandang disabilitas yang dikekang oleh keluarganya dan sama sekali tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan bersosialisasi. Ibu Leli selaku ketua PPDI Kota Semarang memberikan pengetahuan bagaimana cara mendidik dan merawat serta menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas kepada keluarga serta si penyandang disabilitas itu sendiri.

Melalui advokasi DPC PPDI Kota Semarang juga memberi pengetahuan kepada keluarga si penyandang disabilitas mengenai betapa pentingnya pendidikan serta mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan kelompok dan mengikuti kegiatan kelompok. Sama seperti masyarakat pada umumnya penyandang disabilitas membutuhkan interaksi sosial atau membutuhkan wadah untuk bereksprsi. DPC PPDI Kota Semarang telah membuat tiga kelompok disabilitas antara lain adalah Karunia Ilahi bertempat di Meteseh, Ar-Rizki yang bertempat di Rowosari, lalu di pedurungan yang bernama Kuncup Mekar. PPDI terus berusaha membuat kelompok-kelompok disabilitas di berbagai daerah di Kota Semarang. Dari terbentuknya kelompok ini akan menjadi wadah pemersatu bagi para penyandang disabilitas yang ada disekitar daerah tersebut.

---

<sup>76</sup> Australia Indonesia Partnership for Justice & Handicap International. 2014. "Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas", hlm. 52

Kebanyakan anak penyandang disabilitas memiliki kehidupan yang lebih menyendiri, jikapun mereka melakukan kegiatan di luar mereka tidak akan jauh-jauh dari anggota keluarga mereka. Kadang respon dari masyarakat sekitar mengenai si anak penyandang disabilitas juga mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Respon dari masyarakat yang negatif dapat mengakibatkan anak penyandang disabilitas memilih menjauhi kontak sosial dengan masyarakat pada umumnya.

Pada awalnya DPC PPDI Kota Semarang melakukan pendataan penyandang disabilitas dengan cara melihat data yang telah ada, setelah itu PPDI datang dari satu rumah ke rumah lain untuk melakukan *crosscheck*, dari situ PPDI mengetahui jenis penyandang disabilitasnya, alamatnya, jumlahnya. Perlahan Ibu Leli memberikan pemahaman pentingnya pembentukan sebuah kelompok kepada penyandang disabilitas serta kepada anggota keluarganya. Setelah kegiatan *crosscheck* dari rumah ke rumah selesai lalu dibuatlah sebuah kelompok disabilitas. Dengan adanya kelompok ini diharapkan dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi para anggota kelompok penyandang disabilitas berkembang secara optimal karena di kelompok ini mereka dapat berekspresi dengan bebas. Setelah terbentuknya kelompok tersebut DPC PPDI Kota Semarang memberikan bimbingan serta membuat struktur untuk mengatur kegiatan yang akan dijalankan. Pendampingan oleh DPC PPDI Kota Semarang untuk mengembangkan sebuah sistem, lalu dari struktur tadi perlahan-lahan kegiatan *intern* dipasrahkan kepada ketua dan struktur kepengurusan untuk diberikan wewenang penuh guna melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

## 2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Penyandang disabilitas yang telah masuk dalam sebuah kelompok disabilitas baik kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan ke difabelannya atau pembentukan kelompok sesuai dengan wilayahnya. Mereka dikembangkan melalui cara-cara partisipatif, relawan untuk memberikan kemampuan pun dihadirkan demi meningkatkan keterampilan.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai *deviant* (penyimpangan). Mereka seringkali

kurang dihargai dan bahkan di cap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek tertentu.<sup>77</sup> Dalam kenyataan tersebut yang masih banyak dijumpai ketidakadilan oleh karena itu kelompok disabilitas berhak atas hak-hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapat sebagai bagian dari warna Negara Republik Indonesia.

Ketidakberdayaan penyandang disabilitas akibat banyaknya ketidakadilan yang masih mereka alami sampai sekarang harus disikapi dengan bijak. Berangkat dari masalah ketidakberdayaan dan ketidakadilan tersebut PPDI berusaha memberikan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan contohnya adalah pelatihan ekonomi kreatif di kelompok disabilitas yang sudah ada. DPC PPDI Kota Semarang sampai sekarang telah membuat tiga kelompok disabilitas yang ada di Meteseh, Rowosari, dan Pedurungan dengan terbentuknya kelompok disabilitas tersebut memudahkan para *stakeholder* dalam melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di setiap kelompok disabilitas cenderung berbeda karena jenis dan karakteristik penyandang disabilitas tiap kelompok berbeda-beda. Jenis pemberdayaan dan pelatihan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Ibu Khomsih ketua kelompok Karunia Ilahi Meteseh menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan di Kelurahan setempat dengan mengandalkan para relawan dari Kampus yang ada di sekitar Kota Semarang, LSM dan lain sebagainya. Anak disabilitas yang masih kecil dalam kelompok diajari bermain untuk edukasi dan fisioterapi, sedangkan tenaga fisioterapinya berasal dari relawan PPRBM. Lalu anak disabilitas dewasa diajari pelatihan kerajinan tangan. Pelatihan yang telah dilakukan bervariasi dulu pernah mengadakan pelatihan membuat dan sekarang pelatihan keterampilan kerajinan tangan oleh relawan Sahabat Unik Luar Biasa (SULBI). Kerajinan tangan adalah kegiatan seni yang mengolah bahan-bahan tertentu menjadi produk yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga mengandung nilai estetika.<sup>78</sup> Kerajinan tangan dalam prosesnya membutuhkan suatu ketelatenan dan keuletan agar barang yang ingin dibuat memiliki suatu nilai estetika dan nilai jual karena dapat dimanfaatkan fungsinya.

---

<sup>77</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 60-61

<sup>78</sup> Yopi H. Nasir. *Gerbang Kreativitas: Jagat Kerajinan Tangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 5

Produk kerajinan tangan memiliki fungsi dan peranan yang sangat beragam yaitu sebagai pendukung edukasi, sebagai dekorasi/hiasan, sebagai benda fungsional, sebagai mainan dan sebagai souvenir/cinderamata.<sup>79</sup> Berbagai fungsi dari hasil kerajinan tangan dapat diperoleh dari kreativitas para pengrajin. Para pengrajin bisa memanfaatkan barang-barang yang dinilai sudah tidak digunakan atau sudah hilang nilai gunanya. Barang-barang yang dianggap sampah sekalipun yang pengrajin nilai masih memungkinkan untuk dimanfaatkan dapat diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dan memiliki fungsi tertentu.

Kesimpulannya adalah kerajinan tangan merupakan kegiatan seni mengolah bahan-bahan disekitar kita untuk menambah nilai estetika dan memanfaatkan dari hasil olahan produk kerajinan tersebut. Pelatihan kerajinan tangan menggunakan daur ulang bahan bekas hasil dari kerajinan tangan tersebut berupa gantungan kunci, tempat pencil dan lain-lain. Hasil kerajinan tersebut sudah pernah dipasarkan lewat bazar-bazar, dipasarkan lewat online, kedepan hasil kerajinan tersebut bisa ditawarkan untuk *souveneer* orang nikahan. Pelatihan yang ada di Karunia Ilahi Meteseh dilakukan seminggu dua kali pada hari selasa dan kamis sore jam 4 sore sampai selesai.

Ibu Leli lebih lanjut menjelaskan contoh pemberdayaan kelompok antara lain seperti kerja sama antara PPDI dengan Gerakatin karena melihat sulitnya para tuli dalam berkomunikasi ke dalam masyarakat yang nondisabilitas, PPDI membantu Gerkatatin untuk menyebar luaskan Bisindo ke dalam masyarakat umum agar lebih dikenal dengan cara mengadakan pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia yang diketahui lebih gampang diaplikasikan oleh tuli bahkan nondisabilitas sekalipun.

Bahasa isyarat adalah sarana komunikasi yang sangat vital bagi penyandang tunarungu. Bahasa isyarat ini menggunakan simbol-simbol melalui gerak tangan, mimik muka, dan gestur tubuh dikarenakan penyampaian ataupun penerimaan pesan memiliki kelainan artikulasi, seperti tidak mampu berbicara dan mendengar. Dalam pergaulan sehari-hari, para komunitas tunarungu menggunakan bahasa isyarat secara natural, alamiah, dan refleks dengan membaca gerak bibir seseorang. Penggunaan gerak tubuh dan

---

<sup>79</sup> Yopi H. Nasir. *Gerbang Kreativitas: Jagat Kerajinan Tangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 6

gerak bibir memerlukan suatu fokus tatapan mata terdapat mimik atau yang disebut dengan ekspresi muka.<sup>80</sup>

Sama seperti manusia lainnya penyandang tuli pun mempunyai cara komunikasinya sendiri,<sup>81</sup> Sistem komunikasi yang praktis dan efektif untuk penyandang keistimewaan ini telah dirancang oleh lembaga yang menanganinya sebagai Bahasa Isyarat Indonesia oleh organisasi Gerkatin. Saat ini, lembaga-lembaga penyiaran sudah menggunakan bahasa isyarat ini sebagai pendamping dalam acara-acara yang disiarkan melalui media televisi atau pendampingan ketika mengadakan kegiatan kemeriahan seperti olahraga, kesenian, dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan untuk membantu dan memberikan penerangan informasi yang benar dan sejajar bagi penyandang “istimewa” ini. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan pula bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bisindo awalnya dianggap hanya untuk antar penyandang tuli saja, penyandang tuli yang masih kesulitan dalam berkomunikasi dengan masyarakat nondisabilitas. PPDI Serta Gerkatin berharap dengan adanya Bisindo dapat disosialisasikan lebih luas lagi agar para tuli dapat lebih memahami percakapan dengan nondisabilitas.

Inti dari pemberdayaan kelompok disabilitas di sini adalah memberdayakan kelompok yang masih lemah agar tidak tertindas dengan ketidakadilan yang ada. Dengan adanya pemberdayaan di kelompok disabilitas, para anggotanya pun otomatis merasakan efek dari pemberdayaan tersebut. Adanya kelompok ini pun membuat para penyandang disabilitas mempunyai sebuah wadah untuk dapat saling berinteraksi dan merumuskan hal-hal yang dianggap masih memiliki ketidakberdayaan dan ketidakadilan.

### 3. Manajemen diri

Kegiatan yang ada di tiap kelompok disabilitas yang telah dibentuk oleh DPC PPDI Kota Semarang. Dibentuk pemimpin dan struktur kepengurusan agar kegiatan yang ada bisa direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi dengan baik. Dalam setiap kelompok mereka bertugas untuk melakukan pendataan, pelaporan kepada DPC PPDI. Jika struktur kepengurusan kelompok sudah ada maka mereka melakukan analisis keadaan dan

---

<sup>80</sup> Ratu Mutialela Caropeboka. *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 28-29

<sup>81</sup> Ratu Mutialela Caropeboka. *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 29

merumuskan masalah serta kebutuhan anggota yang mereka punya. Jika analisis tersebut telah selesai maka dibuatlah program kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

DPC PPDI Kota Semarang bertugas untuk pendataan awal penyandang disabilitas dan membentuk kelompok di tiap-tiap kecamatan yang mempunyai penyandang disabilitas. Dari situ PPDI membimbing dan mengevaluasi aktivitas penyandang disabilitas jika sudah berjalan dengan lancar kegiatan yang ada didalam kelompok perlahan-lahan dilepas dan DPC PPDI Kota Semarang berusaha untuk membentuk kelompok-kelompok lainnya.

#### 4. Mobilisasi sumber daya

Pemberdayaan penyandang disabilitas DPC PPDI harus mempunyai sumber daya untuk menggerakkan kegiatan yang ada di dalamnya. Sumber daya yang dimaksudkan adalah anggaran dana untuk kegiatan. Modal ini ada dari berbagai sumbangan baik dari pihak dalam atau dari pihak luar secara sukarela untuk menunjang seluruh kegiatan yang membutuhkan suatu anggaran tertentu. Penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber daya harus dimanfaatkan dengan baik sehingga pemberdayaan yang ada dapat terlaksana secara maksimal untuk keberhasilan suatu pemberdayaan.

#### 5. Pembangunan dan pengembangan jejaring.

DPC PPDI Kota Semarang bertanggung jawab atas kelompok atau organisasi penyandang disabilitas yang telah terbentuk karena para anggota kelompok atau organisasi tersebut membutuhkan akses untuk meningkatkan keberdayaan mereka. DPC PPDI Kota Semarang membangun dan mempermudah jaringan kepada para *stakeholder* yang memperhatikan nasib para penyandang disabilitas. Dari para pemerhati penyandang disabilitas tersebut PPDI sangat terbantu dan mampu membuat program kegiatan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu contohnya adalah akses kepada pemerintah, PPDI menjadi pengawas serta penasehat kepada pemerintah mengenai kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu menjadi peluang bagi penyandang disabilitas agar mampu meningkatkan status berdaya mereka. Contoh pengembangan jaringan yang lain adalah kerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti kerja sama dengan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) untuk para penyandang disabilitas yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan secara cuma-cuma dengan sistem sewa, sewa yang dimaksud adalah setelah penyandang disabilitas menerima dan menggunakan kursi roda ini tidak pas dan

tidak nyaman lagi akan diganti yang baru. dan pelaksanaan dari program bantuan kursi roda ini melalui beberapa tahap seperti pengusulan bantuan, pengukuran dan lain-lain agar penerima program bantuan tidak salah dan tepat sasaran. Selain program bantuan kursi roda ada program pembagian al-Qur'an braille kepada para penyandang disabilitas netra. Program ini dikhususkan kepada disabilitas netra yang telah bisa membaca tulisan braille.

Pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat yang kurang berdaya itu harus dipahami bahwa pemberdayaan bukan dimaksudkan untuk para penerima manfaat menggantungkan sepenuhnya hidupnya pada *stakeholder*. Namun pemberdayaan harus mampu membuat para penerima manfaat menjadi lebih baik, lebih baik dalam arti lebih mempunyai daya dalam kehidupannya sehingga para penerima manfaat tersebut dapat lebih mandiri. Pemberdayaan disabilitas tidak lah mudah karena dalam proses pemberdayaannya hampir pasti mengalami kendala. Contohnya adalah para penyandang disabilitas masih banyak yang hanya mengharapakan uluran tangan dari para pemerhati nasib mereka sebagai ukuran keberhasilan. Maka dari itu setiap proses pemberdayaan disabilitas harus memberikan motivasi untuk percaya diri agar mampu untuk berusaha dan bekerja keras demi kemandirian, dan pemenuhan kehidupannya sendiri.

Pemberdayaan dapat memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat, masyarakat yang mengalami pemberdayaan dan yang tidak mengalami pemberdayaan sangat terlihat perbedaannya. Suatu pemberdayaan akan dirasakan manfaatnya jika proses pemberdayaan berjalan dengan baik karena proses pemberdayaan diikuti dengan visi misi yang jelas sesuai dengan kebutuhan sehingga menimbulkan ketertarikan dan partisipasi dari masyarakat secara kontinyu dalam pemberdayaan itu sendiri, dan berharap dalam pemberdayaan memberikan dampak nyata kepada masyarakat secara nyata.

Tabel 3. Perbedaan Sikap Orang-orang yang Mengalami dan Tidak Mengalami Pemberdayaan<sup>82</sup>

No.	Mengalami Pemberdayaan	Tidak Mengalami Pemberdayaan
1	Terbuka akan perubahan	Tertutup, tak mau berubah
2	Tegas	Agresif
3	Proaktif	Reaktif
4	Mawas diri	Menyalahkan orang lain
5	Mandiri	Tergantung pada orang lain
6	Berperasaan	Dikuasai emosi
7	Belajar dari kesalahan	Merasa terpukul kalau salah
8	Menghadapai segala sesuatu	Cenderung menghindar
9	Hidup di masa sekarang	Hidup di masa lalu atau masa depan
10	Realistis	Tidak realistis
11	Berfikir relatif	Berfikir mutlak-mutlakan
12	Harga diri tinggi, percaya diri	Rendah diri

Perbedaan orang-orang yang mengalami pemberdayaan dan tidak mengalami pemberdayaan di atas sudah sangat terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat jelas dari karakteristik seseorang yang mengalami dan tidak mengalami pemberdayaan, sama seperti penjelasan dari Peter Colerige, Ibu Khomsih menjelaskan jika anak penyandang disabilitas yang dulunya tidak mengikuti pemberdayaan dikomunitas sangat berbeda dengan sekarang yang telah mengalami pemberdayaan dikomunitas. Jadi kesimpulannya orang yang mengalami pemberdayaan lebih baik dalam menjalani aktifitas sehari-hari, dengan adanya pemberdayaan yang diikuti penyandang disabilitas diharapkan mendapat nilai-nilai positif yang masuk ke dalam diri sehingga penyandang disabilitas dapat lebih percaya diri menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pentingnya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. PPDII Kota Semarang berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan serta berjuang demi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan. Dari ketidakadilan menuju

<sup>82</sup> Peter Coleridge. *Pembebasan dan Pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 68

keberdayaan dan keadilan menjadi mimpi seluruh penyandang disabilitas Kota Semarang. Dengan demikian PPDI Kota Semarang memberikan pemberdayaan melalui advokasi, pembentukan kelompok, pemberdayaan kelompok, serta bantuan sosial. Lewat berbagai pemberdayaan tersebut diharapkan penyandang disabilitas Kota Semarang lebih mampu untuk memperbaiki kehidupannya agar membuktikan bahwa penyandang disabilitas bisa mandiri.

## **B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang**

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>83</sup>

Dalam pemberdayaannya, DPC PPDI Kota Semarang memiliki berbagai kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan penyandang disabilitas sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk adanya perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek baik bersifat fisik, ekonomi, kegiatan sosial, serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi suatu proses pemberdayaan, ada faktor pendukung yaitu faktor yang sangat penting dan dibutuhkan demi kelancaran suatu proses pemberdayaa hingga mencapai tujuan awal dari pemberdayaan tersebut. Adapun faktor penghambat yaitu faktor yang menajadi kendala dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan faktor ini perlu untuk dicari solusinya guna mengatasi kendala yang ada. Peneliti di sini menganalisis faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan analisis SWOT.

---

<sup>83</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 60

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).<sup>84</sup> Setelah Analisis kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman ini ditemukan diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan *real* suatu pemberdayaan yang sedang berlangsung.

Tabel 4. Analisis SWOT

<b><i>Strengths (Kekuatan)</i></b>	<b><i>Opportunities (Peluang)</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat dari DPC PPDI Kota Semarang.</li> <li>2. DPC PPDI Kota Semarang tanggap dengan keadaan serta kebutuhan penyandang disabilitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dari Pemerintah.</li> <li>2. Dukungan dari relawan.</li> <li>3. Dukungan dari LSM.</li> <li>4. Antusiasme penyandang disabilitas tinggi.</li> <li>5. Antusiasme dari nondisabilitas tinggi.</li> </ol>
<b><i>Weaknesses (Kelemahan)</i></b>	<b><i>Threats (Ancaman)</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan waktu anggota DPC PPDI.</li> <li>2. Anggota organisasi yang tidak patuh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecemburuan dari kelompok disabilitas lain.</li> <li>2. Sulitnya memberikan pemahaman tentang organisasi penyandang disabilitas.</li> <li>3. Pendataan penyandang disabilitas yang masih sangat sulit.</li> </ol>

Menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, maka peneliti menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas DPC PPDI Kota Semarang, sebagai berikut:

<sup>84</sup> Freddy Rangkuti. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta : PT Graia Pustaka Utama, 2006), hlm. 18-19

## 1. Faktor Pendukung (*Strength* dan *Opportunities*).

Faktor pendukung adalah faktor yang dibutuhkan dalam suatu proses pemberdayaan, faktor pendukung ini diperlukan guna menunjang kelancaran serta keberhasilan suatu proses pemberdayaan. Faktor ini menjadi kunci kekuatan suatu pemberdayaan dan harus dijaga terus demi keberlangsungan suatu kegiatan. Faktor pendukung analisis SWOT ini antara lain adalah *Strength* dan *Opportunities*. Berikut adalah faktor pendukung *Strength* tersebut:

- a) Adanya semangat yang tinggi dari pengurus PPDI PDC Kota Semarang.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menjadikan masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya, ketidakadilan menjadi keberadilan, tidak mandiri menjadi pribadi atau kelompok yang mandiri. Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut dibutuhkan proses yang panjang oleh karenanya semangat juang yang terus terpupuk demi tercapainya suatu tujuan sangat dibutuhkan. Ibu Leli menjelaskan DPC PPDI Kota Semarang sudah bertahun-tahun terhitung sejak 2016 berjuang mencurahkan waktu dan tenaga mereka untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Lewat berbagai program kerja yang telah dilakukan sudah memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas khususnya di Kota Semarang.

- b) DPC PPDI Kota Semarang tanggap dengan keadaan serta kebutuhan penyandang disabilitas.

Keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak lepas dari perencanaan program kerja yang baik, perencanaanpun membutuhkan pemahaman, pengetahuan, serta kecakapan yang baik pula untuk memahami kebutuhan suatu fakta keadaan yang sedang terjadi khususnya keadaan penyandang disabilitas. DPC PPDI Kota Semarang tanggap dalam memahami situasi penyandang disabilitas terbukti dari tahun 2016 sampai sekarang sudah banyak program kerja yang telah dilaksanakan dan dirasakan oleh penyandang disabilitas Kota Semarang. Program seperti advokasi, pelatihan kemampuan, serta bantuan langsung terhadap penyandang disabilitas membantu mereka agar mempunyai keberdayaan yang mereka butuhkan.

Adapun faktor pendukung analisis SWOT dalam proses pemberdayaan yang lain adalah *Opportunities*. Faktor ini adalah faktor yang dapat memberikan keuntungan,

faktor yang dapat menjadi penunjang dan penguat suatu proses pemberdayaan adanya faktor ini dapat memberikan nilai tambah dalam setiap kegiatan. adalah sebagai berikut:

a) Adanya dukungan dari Pemerintah.

Selain melakukan pemberdayaan secara langsung ke dalam masyarakat penyandang disabilitas. PPDI Kota Semarang adalah mitra bagi pemerintah daerah, sebagai penasehat pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas yang telah diakui. Dari situ *support* dari pemerintah sangat terasa setiap PPDI Kota Semarang mengadakan suatu acara yang dinilai berguna untuk penyandang disabilitas. Dukungan tersebut juga hadir dalam bentuk bantuan langsung kepada penyandang disabilitas salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017 memberikan bantuan berupa 19 kaki palsu, 6 pasang sepatu affo, 10 kursi roda, 5 *walker*, dan 5 *tripad*. Karena pemerintah Kota Semarang masih menilai bahwa Penyandang Disabilitas masih banyak yang membutuhkan bantuan langsung.

Pemerintah Kota Semarang serta DPC PPDI Kota Semarang terus berjuang menjadikan Kota Semarang sebagai kota Inklusif, karena kota Inklusif lebih memanusiakan manusia tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan yang dirasakan para penyandang disabilitas. Kota Semarang terus berbenah dan terus menyuarakan keadilan kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama bergerak menciptakan lingkungan yang mendukung para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terus berjung demi menjadi pribadi atau kelompok yang mandiri oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang sangat mengapresiasi kepada penyandang disabilitas. Contoh lain adalah penyandang disabilitas diikutkan dalam Muasyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018.

c) Dukungan dari relawan.

Dukungan ada dari para relawan atau pemerhati nasib penyandang disabilitas, para relawan tersebut ada diberbagai pihak seperti kampus, atau dari masyarakat umum. Relawan tersebut menajdi volunteer diberbagai kegiatan pemberdayaan disabilitas baik menjadi penitia, atau bahkan menjadi fasilitator.

d) Dukungan dari LSM.

Dukungan lain ada dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam berbagai bidang seperti pemerhati ekonomi atau yang bergerak khusus untuk penyandang disabilitas, seperti Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) yang memberikan bantuan kursi roda kualitas tinggi bagi penyandang disabilitas.

e) Antusiasme yang tinggi dari penyandang disabilitas.

Setelah bergabung program yang telah dilakukan oleh PPDI Kota Semarang, DPC PPDI Kota Semarang mendapat pandangan positif dari penyandang disabilitas itu sendiri. Kebijakan program bantuan yang membuat penyandang disabilitas baik individu maupun kelompok disabilitas merasa terbantu membuat mereka men-*support* PPDI Kota Semarang untuk terus berjuang demi pemenuhan hak-hak disabilitas, serta berjuang demi tercapainya keberadilan dalam suatu tatanan masyarakat.

f) Antusiasme yang tinggi dari nondisabilitas.

Antusiasme ini hadir dari nondisabilitas baik dari kalangan akademik maupun umum, mereka tergerak karena alasan masing-masing. Contohnya adalah adanya pelatihan Bisindo yang selalu ramai serta mendapatkan perhatian dari nondisabilitas.

## 2. Faktor Penghambat (*Weakness dan Threats*).

Faktor penghambat ini adalah *Weakness* dan *Threats*, dalam suatu proses pemberdayaan pasti ditemukan suatu kekurangan dan keterbatasan, termasuk juga di dalam pemberdayaan DPC PPDI Kota Semarang. Faktor *Weakness* ini dapat memberikan dampak negatif. Berikut faktor *Weakness* tersebut:

a) Keterbatasan waktu dari anggota kepengurusan PPDI.

DPC PPDI Kota Semarang adalah salah satu pekerja sosial yang memperhatikan nasib penyandang disabilitas. Setiap anggota mempunyai kesibukan tersendiri tidak hanya sibuk dalam organisasi kemasyarakatan namun juga mempunyai kesibukan di lain hal. Seperti penuturan dari Ibu Leli bahwa kesibukan kerja dapat mempengaruhi kinerja para anggota DPC PPDI Kota Semarang. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berhenti berjuang demi keadilan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

b) Anggota organisasi yang tidak bisa diajak bekerja sama.

Sebuah organisasi mempunyai struktur kepengurusan serta visi dan misi yang diaplikasikan dalam program kegiatan. Di dalam struktur kepengurusan terdapat berbagai bagian-bagian mulai dari ketua, sekretaris hingga anggota. Ketua adalah penggerak dalam sebuah organisasi tugas ketua adalah untuk menyatukan berbagai isi kepala dari seluruh anggota organisasi. Namun ada masalah lain jika ada yang bertindak tidak sesuai dengan arahan ketua organisasi. PPDI Kota Semarang pun mempunyai masalah yang sama. Ibu Leli menjelaskan bahwa ada anggota yang tidak mau bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan. Jika masalah tersebut berlarut-larut dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif kepada organisasi PPDI itu sendiri.

Adapun faktor penghambat yang lain adalah *Threats*, dalam faktor ini pemberdayaan dapat mengalami suatu pelemahan atau bahkan kegagalan jika faktor ini diremehkan. Berikut adalah faktor *Treats* tersebut:

a) Kecemburuan dari organisasi disabilitas atau organisasi pemerhati nasib penyandang lain.

Kota Semarang saat ini memiliki banyak organisasi disabilitas atau organisasi-organisasi yang peduli dengan nasib penyandang disabilitas. Mereka bergerak dengan program kerjanya masing-masing tapi tujuan mereka tetap sama untuk menegakkan keadilan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. PPDI adalah organisasi terdepan pemerhati nasib penyandang disabilitas, PPDI sebagai payung dari seluruh penyandang disabilitas baik individu maupun kelompok disabilitas namun ada masalah lain yaitu tidak semua kelompok disabilitas mengakui PPDI adalah induk yang memayungi kelompok disabilitas serta menjadi pen jembatan bagi kelompok-kelompok disabilitas kepada pemerintah. Kedekatan dan fungsi dari DPC PPDI Kota Semarang dengan Pemkot membuat adanya kecemburuan dari kelompok disabilitas yang tidak paham dengan sejarah dan fungsi dari DPC PPDI Kota Semarang kepada Pemerintah. Dari situ timbul masalah salah satu contohnya adalah banyak program kerja yang jadwalnya berbenturan membuat penyandang disabilitas bingung dan pemberdayaan disabilitas tidak efektif.

- b) Sulitnya memberikan pemahaman kepada keluarga disabilitas.

Menurut penuturan Ibu Leli, memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas tidaklah mudah karena *mindset* mereka masih sebagai objek yang hanya menerima bantuan langsung bukan sebagai subjek yang berusaha dari diri sendiri untuk berdikari. Jika *mindset* mereka masih menginginkan keuntungan praktis maka hanya akan menggantungkan hidup mereka kepada orang lain namun tidak bisa berdikari. Anggapan remeh mengenai keikutsertaan dalam organisasi masih ada. Pemberdayaan dilakukan demi menjadikan individu atau kelompok menjadi lebih berdaya oleh karena itu pemahaman dasar mengenai semua itu harus ditanamkan terlebih dahulu.

- c) Sulitnya pendataan penyandang disabilitas.

Sulitnya pendataan penyandang disabilitas memang menjadi masalah bagi DPC PPDI Kota Semarang, karena pemberdayaan akan mengena lebih luas kepada penyandang disabilitas jika penyandang disabilitas diketahui jumlah serta letaknya di mana. Jika si penyandang disabilitas diketahui alamatnya maka pemerintah serta DPC PPDI Kota Semarang akan lebih gampang dalam melakukan advokasi atau pemberdayaan yang sesuai dengan si penyandang disabilitas.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi 4 (empat) komponen *strength*, *weakness*, *opportunities* dan *threats* dasar pada analisis ini yaitu:

### 1. Faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*).

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam yang terdiri dari *Strength* dan *Weakness*. Jika kelemahan dapat diminimalisir dengan kekuatan yang dimaksimalkan maka pemberdayaan dapat dilaksanakan lebih baik. Adapun faktor internal tersebut:

- a) Pemanfaatan waktu anggota DPC PPDI Kota Semarang semaksimal mungkin.

Anggota DPC PPDI Kota Semarang mempunyai kendala yaitu keterbatasan waktu karena kesibukan masing-masing di luar organisasi seperti kerja, mengurus keluarga, serta kegiatan-kegiatan yang lain. Semangat anggota PPDI untuk memberdayakan penyandang disabilitas harus terus dipupuk serta memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan.

b) Motivasi kepada anggota DPC PPDI Kota Semarang.

Pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan perencanaan yang matang serta kekompakan dari para anggota kepengurusan. Namun jika salah satu dari perencanaan atau kekompakan anggota tersebut tidak berjalan dengan lancar dapat berakibat pemberdayaan tidak semaksimal yang diinginkan. Maka dari itu sesuai dengan tugas seorang ketua harus mampu memberikan motivasi, arahan, masukan dan mampu mengontrol anggota kepengurusan dibawahnya. Jika langkah tidak tidak cukup maka ketua mempunyai hak untuk mengganti anggota yang lebih berkompeten dan dapat bekerja sama.

**2. Faktor Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*).**

a) Jalinan kemitraan dan kerja sama antar lembaga organisasi.

DPC PPDI Kota Semarang sebagai organisasi payung penyandang disabilitas pertama di Indonesia yang sudah diakui oleh pemerintah mendapat kecemburuan sosial dari salah satu organisasi yang juga mengatasnakan organisasi yang menjadi payung penyandang disabilitas. Semua organisasi mungkin bertujuan baik yaitu untuk sama-sama memberdayakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu DPC PPDI Kota Semarang seharusnya melakukan pendekatan dengan menjalin kemitraan dan kerja sama antar lembaga organisasi dan merumuskan bersama pembagian program kerja agar lembaga organisasi yang ada tidak saling bersikutan satu sama lain, jika jejaring kerjasama antar lembaga organisasi berjalan lancar maka akan menunjang kegiatan yang semakin baik.

b) Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, relawan, serta LSM.

Advokasi bagi penyandang disabilitas sampai saat ini masih berjalan demi pemenuhan hak-hak yang mereka tidak dapat. Oleh karena itu kerja sama dengan pemerintah sangat diperlukan, PPDI saat ini sudah bekerjasama dengan pemerintah seperti dengan Petugas Sosial Masyarakat namun berbagai hambatan masih dialami oleh karena itu kerja sama serta pemanfaatan seluruh anggota PPDI dikerahkan agar advokasi dapat terus berjalan. Pemerintah perlu didorong dalam usahanya untuk pendataan penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas mampu diberdayakan sesuai dengan data terbaru dilapangan. Pemberdayaan pun akan semakin maksimal jika semakin banyak pihak yang tergabung di dalamnya seperti relawan, dan LSM pemerhati nasib penyandang disabilitas.

Analisis SWOT ini diharapkan mampu memberikan bantuan untuk menganalisa fakta keadaan yang sedang dihadapi lembaga organisasi DPC PPDI Kota Semarang. Metode ini bukan dimaksudkan untuk menjadi jawaban mutlak yang menjadi acuan solusi pasti dalam menghadapi masalah yang ada. Namun setidaknya dari analisa ini memberikan gambaran untuk memecahkan persoalan dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dirangkum dari lapangan ada pada bab sebelumnya, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Berikut kesimpulan dari penelitian yang peneliti telah rangkum:

1. Strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang antara lain:

a) Motivasi

Melalui advokasi DPC PPDI Kota Semarang juga memberi pengetahuan kepada keluarga si penyandang disabilitas mengenai betapa pentingnya pendidikan serta mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan kelompok dan mengikuti kegiatan kelompok. Sama seperti masyarakat pada umumnya penyandang disabilitas membutuhkan interaksi sosial atau membutuhkan wadah untuk berekspresi. DPC PPDI Kota Semarang telah membuat tiga kelompok disabilitas antara lain adalah Karunia Ilahi bertempat di Meteseh, Ar-Rizki yang bertempat di Rowosari, lalu di pedurungan yang bernama Kuncup Mekar.

b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Ketidakterdayaan penyandang disabilitas akibat banyaknya ketidakadilan yang masih mereka alami sampai sekarang harus disikapi dengan bijak. Berangkat dari masalah ketidakberdayaan dan ketidakadilan tersebut PPDI berusaha memberikan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan contohnya adalah pelatihan ekonomi kreatif di kelompok disabilitas yang sudah ada. DPC PPDI Kota Semarang sampai sekarang telah membuat tiga kelompok disabilitas yang ada di Meteseh, Rowosari, dan Pedurungan dengan terbentuknya kelompok disabilitas tersebut memudahkan para *stakeholder* dalam melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di setiap kelompok disabilitas cenderung berbeda karena jenis dan

karakteristik penyandang disabilitas tiap kelompok berbeda-beda. Jenis pemberdayaan dan pelatihan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka.

c) Manajemen diri

Kegiatan yang ada di tiap kelompok disabilitas yang telah dibentuk oleh DPC PPDI Kota Semarang. Dibentuk pemimpin dan struktur kepengurusan agar kegiatan yang ada bisa direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi dengan baik. Dalam setiap kelompok mereka bertugas untuk melakukan pendataan, pelaporan kepada DPC PPDI. Jika struktur kepengurusan kelompok sudah ada maka mereka melakukan analisis keadaan dan merumuskan masalah serta kebutuhan anggota yang mereka punya. Jika analisis tersebut telah selesai maka dibuatlah program kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

d) Mobilisasi sumber daya

Pemberdayaan penyandang disabilitas DPC PPDI harus mempunyai sumber daya untuk menggerakkan kegiatan yang ada di dalamnya. Sumber daya yang dimaksudkan adalah anggaran dana untuk kegiatan. Modal ini ada dari berbagai sumbangan baik dari pihak dalam atau dari pihak luar secara sukarela untuk menunjang seluruh kegiatan yang membutuhkan suatu anggaran tertentu.

e) Pembangunan dan pengembangan jejaring.

DPC PPDI Kota Semarang bertanggung jawab atas kelompok atau organisasi penyandang disabilitas yang telah terbentuk karena para anggota kelompok atau organisasi tersebut membutuhkan akses untuk meningkatkan keberdayaan mereka. DPC PPDI Kota Semarang membangun dan mempermudah jaringan kepada para *stakeholder* yang memperhatikan nasib para penyandang disabilitas.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan disabilitas oleh PPDI Kota Semarang adalah antara lain:

a) Faktor pendukung yaitu:

1) *Strenght* (Kekuatan)

(a) Semangat dari DPC PDI Kota Semarang

(b) DPC PPDI Kota Semarang Tanggap dengan keadaan serta kebutuhan penyandang disabilitas

2) *Opportunities* (Peluang)

- (a) Dukungan dari pemerintah.
  - (b) Dukungan dari relawan.
  - (c) Dukungan dari LSM.
  - (d) Antusiasme penyandang disabilitas tinggi.
  - (e) Antusiasme dari nondisabilitas tinggi.
- b) Faktor penghambat yaitu:
- 1) *Weakness* (Kelemahan)
    - (a) Keterbatasan waktu anggota DPC PPDI Kota Semarang
    - (b) Anggota organisasi yang tidak patuh.
  - 2) *Threats* (Ancaman)
    - (a) Kecemburuan dari kelompok disabilitas lain.
    - (b) Sulitnya memberikan pemahaman tentang organisasi penyandang disabilitas.
    - (c) Pendataan penyandang disabilitas yang masih sangat sulit.

### **C. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang peneliti rangkum mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang sebetulnya sudah kian membaik. Penyandang disabilitas banyak yang sudah terbantu dan merasakan dampak nyata dengan berbagai agenda program kegiatan, bantuan dan lain-lain. Kondisi tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar kesetaraan dan keadilan penyandang disabilitas di Kota Semarang semakin terjamin.
2. Suatu organisasi akan solid jika anggota kepengurusan saling bekerja sama dengan anggota lainnya. Maka dari itu komunikasi serta pengertian dari setiap anggota harus ada jika ingin organisasi solid agar pemberdayaan bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Amaliah, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016)
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017)
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005)
- Caropeboka, Ratu Mutialela. *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017)
- Eko Gugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Merdeka, 2015)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Jalaludin Rakhmat, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirannya Jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)
- Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013
- Muri yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Nasir, Yopi H. *Gerbang Kreativitas: Jagat Kerajinan Tangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997)
- Rangkuti, Freddy. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta : PT Gradia Pustaka Utama, 2006)

- Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005)
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Tim Indepth Rights PPRBM Yayasan Bhakti Luhur. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang: CBM, 2016)
- Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, (Bandung; Afabeta, 2012)
- Warsilah, Henny. *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo Jawa Tengah*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

## **JURNAL**

- Australia Indonesia Partnership for Justice & Handicap International. 2014. “Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas”

## **INTERNET**

- Agendaasia.org. 2011. “Profil Organisasi: Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)”, dalam <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/%20artikel/berita/146-profilorganisasi-persatuan-penyandang-cacat-indonesia-ppci>., diakses pada 29 Januari 2018.
- Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. *Masyarakat ASEAN Edisi 11: Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis*, Majalah Online diakses pada tanggal 29 September 2017 dari <http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>
- Ppdi.or.id, 2012. “PPCI berganti nama menjadi PPDI”, dalam <https://ppdi.or.id/ppci-berganti-nama-menjadi-ppdi.html>., diakses pada 29 Januari 2018.
- Ppdi.or.id. 2012. “Profil PPDI”, dalam <https://ppdi.or.id/profil-ppdi>., diakses pada 29 Januari 2018.
- Ppdi.or.id. 2012. “Sejarah PPDI” dalam <https://ppdi.or.id/sejarah>., diakses pada 03 Oktober 2017.
- Ppdi.or.id. 2012. “Sejarah PPDI” dalam <https://ppdi.or.id/sejarah>., diakses pada 29 Januari 2018.
- Ppdi.or.id. 2016. “DPP & DPD Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Masa Bhakti ” dalam <https://ppdi.or.id/profil-pengurus>., diakses pada 29 Januari 2018.

HASIL WAWANCARA  
DENGAN IBU LINDA FATMAWATI (LELI)

Tanggal : 30 Januari 2018  
Pukul : 09.00  
Tempat : PRPP Kota Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pemberdayaan di PPDI Kota Semarang?	Pemberdayaan berfokus pada wiraswasta, daur ulang Koran, bungkus kopi, di tembalang ada dua kecamatan Meteseh dan Rowosari, yang di Meteseh kebanyakan sudah remaja, disana kebanyakan difabelnya tuli istilahnya rungu wicara. Jika di Rowosari difabelnya memang agak berat banyak macam-macamnya ada yang hedrosepalus dan lain-lain jadi di Rowosari kita disana kebanyakan memakai terapi-terapi bermain, seperti bermain bola, bola yang besar bola terapi, sepertinya memang main-main padahal itu sebenarnya adalah terapi bermain, terus masukkan lubang kancing dan lain-lain. Istilahnya itu terapi sensorik, jadi sistemnya kita bermain, misalnya balok segitiga dimasukan di lobang segi tiga. Seperti itu. Jadi kita pemberdayaannya itu menyesuaikan kebutuhan disitu. Jika di Meteseh kita fokuskan pemberdayaan jika di Rowosari jika di Rowosari kita fokuskan pada terapi-terapi bermain.
2	Bantuan apa yang telah diusahakan PPDI Kota Semarang?	Program bantuan kita kerja sama dengan OHANA, bantuan kursi roda, dengan pengukuran kursi roda khusus, satu kursi roda itu paling murah harga 20-80 juta itu kita beri gratis dengan sistem sewa, sewa di sini artinya jika sudah tidak nyaman diganti. Kita fokuskan pada penderita punggung. Karena jika menggunakan kursi roda biasa....apa namanya...nanti lama kelamaan akan mempengaruhi tulang belakang. Jadi bantuan ini khusus untuk ABK. Di situ nanti harus diukur jadi tidak bisa sembarangan.
3	PPDI sudah membuat berapa Kelompok disabilitas? Dan bagaimana hambatan pembuatan Kelompok	Jadi di PPDI itu sudah membuat tiga kelompok di Meteseh namanya karunia ilahi, kalo di Rowosari itu ar-rizki, jika dipedurungan itu kuncup mekar. Mau bentuk kelompok di banyu

tersebut?	<p>manik belum nyampe. Daur ulang tadi kita sudah bawa ke bazar-bazar, PPDI sementara ikut bantu memasarkan produk-produk nya.</p> <p>Saat PPDI membentuk kelompok yang menajadi penghambat adalah pemerintah setempat tidak tahu jika di daerah meraka ada difabel, saya tidak menyalahkan sepenuhnya pemerintah karena dilapangan memang banyak kendala, salah satunya adalah pendidikan orang tua yang tidak mengerti, maksudnya itu mereka mengira anak mereka kerasukan, masih meyakini hal-hal mistis, jadi ibunya itu tidak tahu jika anaknya itu difabel atau anak-anak <i>down syndrome</i> itukan jika orang tidak tahu kan mengiranya mereka itu kerasukan atau gila. Lalu PPDI itu kasih Advokasi pelan-pelan jika anak itu adalah difabel, kita kasih pengetahuan. Jadi ada difabel yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan, seperti saya jika saya duduk kan tidak ada yang tahu jika saya adalah difabel.</p> <p>Ya tantangan kita saat membentuk kelompok itu ya berat. Pak lurah saja kadang saya bawa, saya eret-eret. Bahkan sempet dapet penolakan dari keluarga karena mereka malu.</p> <p>Banyak program-program kedepan program kita banyak sekali. Tapi program kita besok harus program yang sudah bener-bener apa istiahnya programnya itu harus bisa menjangkau keluar, karena selama inikan pemberdayaan kita kan masih sekitar itu, seperti menumbuhkan kepercayaan diri, kasih pengetahuan kepada orang tua yang punya anak difabel karena malu “aku gak punya anak difabel” jadi gini kita datang ke rumahnya bilng “bu nuwun sewu kita dari PPDI, kata Pak RT ibu punya anak difabel..” “ndak. Saya ndak punya anak difabel.” “aku rak due anak cacat!) Seperti itu. Jika sudah terbentuk kelompok sudah enak, tapi jika jika baru membentuk banyak kendala, karena mikirnya mikirnya mereka (para orang tua yang punya anak difabel) “mengko aku ntok opo melu iku” “mengko entok bantuan opo” ya selalu begitu. Karena jika mas anas lihat difabel selalu identik dengan objek yang selalu diberi bantuan saja, dan akhirnya membentuk mental</p>
-----------	---

		<p>difabel menjadi peminta-minta. Kita (PPDI) sekarang sedang memperjuangkan kesetaraan hak. Kedepan 15 komunitas difabel di Semarang yang kita payungi itu akan mengadakan FGD dengan 12 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan memperjuangkan kartu disabilitas, kartu disabilitas itu. Jadi kita besok meja bundar dengan pemerintah, bagaimana peran pemerintah itu seperti apa.</p>
4	<p>Bagaimana pelatihan di kelompok-kelompok tersebut?</p>	<p>Di Meteseh itu sudah banyak pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan membuat, handicraft, dan lain-lain. Jika sudah jalan di kelompok-kelompok itu lama kelamaan nanti saya lepas. Jika sudah ada kelompok sudah ada struktur di sana, sudah ada pelatihan yang jalan, sudah ada bantuan alat terapi, lama kelamaan saya lepas pelan-pelan dan kegiatan intern nanti saya pasrahkan kepada ketua nya. Nanti gantian saya mengurus kelompok-kelompok lain (yang belum berdaya), saya dulu juga pernah mengadakan pelatihan-pelatihan kursus komputer gratis untuk para difabel, ya cuma pengenalan-pengenalan dasar bagaimana menggunakan kursor, cara mengetik. Menyalakan komputer, mematikan komputer, seperti itu mas.</p> <p>Di Meteseh itu pemberdayaan ekonomi juga untuk kemandirian, hasil dari produksi mereka nanti di taruh dipameran-pameran. Nanti hasil produksi nya dijual di pameran-pameran. Terus kita bantu lewat marketing online kaya gitu. Cuma kan kalo marketing online kan kali difabelnya bisa internet. Jadi mereka kebanyakan ya membuat terus pemasarannya mereka kesulitan. Kebanyakan teman-teman difabel itu bisa membuat bisa memproduksi tapi mereka tidak tahu cara memasarkannya. Belum ada pelatihan dari hulu kehilir gitu lho mas...hasil karya nya itu ya kaya hasil daur ulang kertas gitu jadi kaya tempat pot, tempat pencil. Jadi PPDI sekarang bantuannya bukan pada intern kegiatan sekarang bantuannya jika ada bazar-bazar kita bantu pameran. Jika ada even atau peringatan kita ikut. Pemasaran online nanti kita posting kita foto produknya, teman-teman difabel kita yang posting, jadi</p>

	<p>pemasaran kita sementara seperti itu. Jadi temen-temen yang sudah buat kerajinan tangan ya kita share di grub-grub, grub facebook kitaposting juga, disahre di whatsapp juga. Kesulitan saat menghimpun teman-teman disabilitas itu juga karena dihambat dari orang tuanya juga seperti “kumpul ngeniku entok opo tho buk, entuk duet rak” “paling kumpul-kumpul tog” jadi ada mainset bahwa disabilitas adalah selalu butuh dikasihani dan diberi bantuan. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena kadang memang ada difabel yang kategori berat. Kan ada tiga kategori difabel ya mas ada difabel mandiri, ada rawat jalan, ada yang berat.</p>
--	---

HASIL WAWANCARA  
DENGAN IBU LINDA FATMAWATI (LELI)

Tanggal : 27 April 2018  
Pukul : 12.00  
Tempat : Gedung Sriratu Telkom Infomedia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pemberdayaan Advokasi?	Tiap kecamatan itu ada PSM (petugas sosial masyarakat) tiap kecamatan ada TKSA (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat), dari Dinas Sosial nanti masuk ke TKSA itu nanti turun ke PSM, TKSA itu jika ada permasalahan sosial masyarakat itu yang handle TKSA lah kakinya itu namanya PSM. Khusus untuk pengelompokan difabel saya pakainya PSM. Dari PSM itu nanti kita tahu masalah-masalah difabel disetiap kecamatan contoh masalah difabel Rowosari, difabel Rowosari kan kebanyakan difabel mental, down syndrome, daksa, netra juga ada katakanlah campuran gitu mas. Nanti dari PSM itu kan kordinasi ke saya “mb leli ada kasus seperti ini katakana lah ada kasus down syndrome, kan kebanyakan orang melihat kasus itu seperti idiot, mukanya sama semua. Lalu dari situ kita datang. Saya datang bersama PSM untuk <i>Home Visit</i> , dari situ kita tahu bagaimana keluarganya terus kita mengetahui keluarga ini memperlakukan anak difabel ini, lingkungannya bagaimana, RT RW tahu apa enggak, kadang kana da RT yang tidak tahu. Dari situ kita dapat data, data yang valid kita kasih ke pak lurah. Ke pak lurah nnti kita blg “pak ini ada kasus down syndrome dan belum ditangani” dari <i>home visit</i> tadi kita kasi advokasi atau pendampingan hukum. Lah tadi advokasinya itu seperti tadi pendekatan ke keluarga setelah mendapat data langsung dibawa ke kelurahan terus sampai ke kecamatan itu namanya advokasi. Nah disitu kita sudah masuk ranah advokasi kita tahu kenapa ada masalah seperti itu, contoh jika ada anak down syndrome itu kenapa? Oh karena orang tuanya menikah

		<p>diumur yang tua, atau karena kelebihan gen kayak gitu, atau lingkungan yang tidak mendukung dari situ kita bisa kasi treatment-treatment apa yang dibutuhkan sama difabel tersebut.</p>
2	<p>Apa kendala saat melakukan advokasi?</p>	<p>Kendala saat advokasi, tidak semua keluarga menerima jika anaknya dikatakan difabel. Bahkan sampai pak lurah saya bawa dengan PSM sampai rumah itu ditutup pintu, jadi keluarganya malu. “anakku orak difabel” “anakku mung rodo angel dungkono” padahal info yang kita dapat dari situ dari sekitar lingkungan rumah tersebut anak tersebut itu tuli, tapi bisa ngomong. Jadi mungkin anggapan orang tua itu anaknya keterlambatan bicara. Padahal anaknya sebenarnya adalah tuna wicara dan tuli. Terus akhirnya ada kendala itu. Ada banyak kasus sampai dipasung itu dikira kerasukan. Jadi saya dengan PSM itu masuk ke ruma itu mengetahui oh tempatnya seperti ini, bahkan tempatnya kumuh banget sampai tidak layak huni ya begitu tantangannya, ya begitu ada yang ngira magic, ada yang ngira kutukan, dikira dikirim teluh seperti itu. Setelah itu kita bentuk kelompok ada pak RT yang anak nya kebetulan difabel dan dia menerima kita ajak buat kelompok. Karena ada mainset yang salah tentang difabel adalah objek mencari bantuan kita buatlah kelompok untuk diberdayakan. Fisioterapi ada dua, terapi sensorik dan motorik. Dan saat saya melakukan terapi saya gabung semua, dan ada alat terapi nya ditiap-tiap kelompok saya tinggali alat terapi untuk mereka, alatnya berupa motoric dan sesorik.</p>
3	<p>Bagaimana peran PPDI saat melakukan pendampingan kelompok disabilitas?</p>	<p>Di tiap-tiap kelompok yang telah dibentuk kita mengadakan pelatihan-pelatihan, kita PPDI mencarikan pelatih untuk memberikan pengetahuan baru, apa namanya gini saat kita sudah membuat kelompok kita sudah mendapat kan ruang kita support dari belakang, istilahnya tanggung jawab sudah kita mulai pasrahkan kepada ketua nya karena kita (PPDI) tidak mungkin atau tidak bisa selalu mendampingi terus menerus. Nanti mb khomsih (ketua kelompok difabel Meteseh)</p>

		kita support dari belakang “mb ini kita ada narasumbernya”
4	Pemberdayaan juga dilakukan kepada Gerkatin, dengan ikut mensosialisasikan Bisindo, bagaimana proses kerja sama dengan Gerkatin?	Dulu waktu kita kerja sama dengan Gerkatin untuk mensosialisasikan Bisindo kan istilahnya itu kayak bahasa isyarat itu cuma untuk orang-orang tertentu saja hanya untuk orang tuli ya tuli tog gitu mas. Kan kalo orang biasa kan lihatnya mereka lapo ngeniku aku orak paham. Terus mb Bebe, koh Aming, bu Yukti itu tho “gimana kalo ngadain pelatihan Bisindo?” yasudah kita fasilitasi, yah maksudnya kita saling bantu. Mulai konsepnya pelatihnya, narasumbernya. Kan kalo budaya tuli kan Cuma tuli saja yang tahu nah kita belajarnya pada mereka.
5	Bagaimana manfaat dari pemberdayaan tersebut?	Manfaat dari pemberdayaan, ini dari segi ekonomi ya mas, gini kan jika ada pemberdayaan kan paling tidak si difabel bisa mandiri. Mandiri dalam arti seperti ini ada dua mandiri secara ekonomi atau mengurus finansialnya sendiri yang kedua adalah mandiri dalam hal mengurus dirinya sendiri. Nah itu yang kita ajarkan. Terkecuali difabel yang rawat karena difabel rawat tidak bisa apa-apa nah tugas kita adalah merawat seumur hidup. Yang dari sosial itu kita menunjukkan bahwa kita itu sama, difabel itu iya punya kemampuan dan kualitas yang sama tetapi kita disebut difabel karena keterbatasan lingkungan. Maksud dari lingkungan adalah aksesnya. Kayak mas anas kan bisa naik tangga cepet saya juga bisa tapi pelan-pelan. Tapi kan sama, sama sama bisa naik tangga gitu lo. Dalam hal politik, difabel juga punya hak politik Cuma memang kita beberapa akses juga. Contohnya masuk dalam KPU kan kalo temen-temen kursi roda pengen masuk kan tidak bisa kurang dari satu meter. Padahal kalau pakai kursi roda kan minim 80 cm setidaknya pintu masuk KPU itu minim 1 meter. Terus bagaimana jika untuk temen-temen yang tidak punya tangan? Itu mejanya jangan ketinggian, kalo gak ya dikasih apa namanya dikasi bancian. Terus ke teman netra, kan teman netra g bisa lihat ya dan kita punya brail an dia paham gitu loh. Nantikan kertasnya juga bisa dikasi braile kan bisa,

		itu dari politik. Dari budaya, kebudayaan seni kan mas anas pernah lihat ada penari difabel yang tuli tu dia kan cantik bisa nari seperti itu. Kita bisa tapi terhambat pada aksesibilitasnya. Jadi yang membuat berbeda difabel dengan non difabel itu karena lingkungannya terutama aksesnya. Dan kita menyamakan hak antara hak antara difabel dan non difabel, kita punya hak sama kita punya kesempatan yang sama walopun dengan cara yang berbeda.
6	Secara umum bagaimana hambatan yang ditemui saat melakukan pemberdayaan?	Hambatannya iya itu, penolakan dari keluarga, mainset orang terhadap difabel, difabel itu cukup dikasihani. Cuma sebagai objek untuk dikasihani. Pemberdayaan difabel itu tidak terlepas dari lingkungannya, jika ingin memberdayakan difabel ya harus melalui lingkungannya juga. Mulai dari yang terdekat yaitu keluarganya. Minimal dari orang tua, orang tua mampu menerima dan menyadari bahawa anaknya difabel dan tahu cara nya mendidiknya tahu cara merawatnya, dan anaknya membu membuat karya itu adalah suatu support yang luar biasa. Lingkungan sekitar ruma itu cuma sebagai pendukung. Lalu dari pemerintah, pemerintah kita tidak akan tahu jika kita difabel kalau istilahnya kita tidak dodok sek “pak ini loh saya ini difabel punya karya” itu pemerintah gak akan tahu. Dan hambatan lainnya itu mas kadang ada anggota organisasi yang tidak patuh sama ketua nya mas. Yo ngeniku dikandani rak iso. Makane enak dadi anggota wae mas dari pada ketua hehe
7	Bantuan apa yang sudah diberikan oleh PPDI?	Programnya ya itu melakukan pendampingan, melakukan advokasi, yang baru-baru ini ibu baru melakukan pembagian Al-qur’an brile kepada teman teman netra secara gratis. Dan bantuan ini kami khususkan untuk teman teman netra yang sudah bisa brile. Dan ini tingkat jawa tengah mas.

HASIL WAWANCARA  
DENGAN IBU KHOMSIH JUMIATI

Tanggal : 21 April 2018

Pukul : 09.00

Tempat : Kediaman Ibu Khomsih Jumiati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pemberdayaan di Kelompok Disabilitas di Meteseh ini?	Di sini sudah terbentuk kelompok ya mas. Namanaya karunia ilahi itu kadang kita mengadakan pertemuan seminggu dua kali, pertemuannya setiap hari selasa dan kamis jam 4 sore. Itu anak disabilitas yang dewasa dilatih untuk keterampilan diajari untuk mandiri sebisa mungkin. Untuk yang anak-anak diajari main-main untuk edukasi dengan fisioterapi. Fisioterapi nya kita kerja sama dengan PPRBM, PPRMB itu yang menyediakan untuk jasa tenaga terapinya.
2	Pelatihan keterampilan di dapat dari mana? Hasilnya apa?	Untuk keterampilan kita mengandalkan relawan relawan mas. Kebetulan kita ada relawan dari Sulbi, Sulbi Sahabat Unik Luar Biasa iya itu yang selalu membantu kita, untuk keterampilannya diajari macem-macem, ada gantungan kunci, daur ulang koran bekas yang dilinting-linting. Sampai sekarang masih aktif. Relawan dari Sulbi, USM, Unisulla, banyak sih mas dari UPGRIS juga ada. Unnes juga mengasih pelatihan. Yang terdata disini sekitar kurang lebih 38. Di sini anak-anak disabilitas nya macem-macem sih mas. Kebanyakan yang besar itu rungu wicara. Anak-anak banyak yang hiperaktif. Istilahnya daksa juga ada.
3	Bagaimana proses pelatihan oleh sulbi?	Kita belajar keterampilan dari Sulbi itu semua bahan awalnya dari mereka yang menyediakan, tapi lama kelamaan kita ikut mencari bahan juga untuk anak-anak. Hasil dari produk tangannya yang dulu-dulu sudah pernah kita ikutkan ke pameran-pameran, bazar. Untuk sekarang yang gantungan kunci dan lain-lain itu kita kumpulkan kita rencana kita packing sambil kita pasarkan lewat online, kita tawar-tawarkan untuk misalkan ada acara nikahan untuk souvenir rencana kedepannya mas.
4	Apa tujuan dari kegiatan pemberdayaan	Tujuannya dari pelatihan nya itu supaya anak-anak difabel yang dewasa supaya mandiri

	di sini?	mas. Mungkin di rumah dia tidak bekerja ya. Mungkin sambil berlatih kita sambil dia bisa punya penghasilan sendiri nantinya.
5	Apa manfaat yang telah dirasakan dari pemberdayaan tersebut?	Ya jika ngomong manfaat sih, kalo dari pendampingnya mas ya ndak seperti dulu-dulu. Mungkin dulu dianya sering mengurung diri di rumah merasa tidak ada temen kalo sekarang kan mungkin banyak ya, dia sekarang merasa dia tidak sendiri. Menjadi agak lebih PD.
6	Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan di sini?	Faktor pendukungnya dari lingkungan dari masyarakat, bahkan dari kelurahan juga mendukung, dkk, mkk, dari teman-teman relawan juga masih support dengan meluangkan waktunya. Faktor penghambatnya kadang dilingkungan juga masih ada yang tidak menerima. Kadang terhambat waktu juga mas. Dari pemerintah juga sudah tahu dari dinsos pernah kesini.

HASIL WAWANCARA  
DENGAN MAS FITRA

Tanggal : 14 April 2018  
Pukul : 20.00  
Tempat : Merby Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan dari diadakannya pelatihan Bisindo?	Tujuan dari kelas Bisindo agar Bisindo berkembang, untuk pelajar agar tahu tentang bahasa isyarat untuk komunikasi orang tuli dengan orang biasa agar nyambung. Jika tidak bisa bahasa isyarat nanti tidak nyambung. Jika kita kerja di kantor atau di mana jika ada orang dengar (orang yang bisa mendengar) bisa bahasa isyarat kita bisa nyambung dengan mereka. Kalau tidak nyambung sulit. Nanti bisa salah paham. Makanya buka kelas bahasa isyarat 10 minggu, dalam seminggu pertemuan dua kali, setiap malam sabtu dan minggu habis maghrib.
2	Bagaimana proses dalam kelas Bahasa tersebut?	Di dalam kelas Bahasa, Pertama belajar abjad dahulu tanpa suara. Jika sudah OK. Dilanjut dengan 1 2 3 angka, terus cara komunikasi, cara berterima kasih dan terus seperti itu secara bertahap. Nanti bisa belajar bersama dengan yang lain. Belajar di depan kaca, belajar cara ber ekspresi. Dulu kita pakainya Sibi tapi sulit untuk dipahami, sulit untuk berkomunikasi. Jadi tuli membuat bahasa sendiri yaitu Bisindo. Sekolah sekolah belum menggunakan Bisindo. Sibi itu yang membuat adalah orang dengar (orang yang bisa mendengar) bukan teman tuli itu sendiri. Tuli buat Bisindo untuk disebarluaskan.
3	Bagaimana cara mensosialisasikan kelas Bisindo? Dan Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan bahasa?	Dulu kita menggunakan tempat-tempat di CFD, kadang buat kelas disana banyak yang datang. Tapi jika tidak ada kelas nanti lama-lama lupa. Makanya bahasa harus diasah terus-terus bahasa nya. Nanti bisa menjadi penerjemah di depan. Terus kita buka kelas pertama kali di RRI dan responnya OK. Inforamsi kelas Bisindo menyebar lewat WA

	<p>dikasi tahu yang lainnya. Ada facebook dan lain-lain.</p> <p>Pendukungnya ada di Pusbisindo Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, dari Pusbisindo mereka menginfokan buat kami untuk membuka kelas ditiap-tiap daerah. Dulu sebelum kelas diinfokan tidak ada yang mendukung tidak apa-apa. Akrhianya kita tetap usaha akhirnya kita dilihat hasil kita.</p>
--	---

HASIL WAWANCARA  
DENGAN MBAK INDIRA

Tanggal : 14 April 2018  
Pukul : 20.00  
Tempat : Merby Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelatihan Kelas Bisindo? Pesertanya dari mana saja?	Pertama kali masuk awal kelas untuk komunikasi dengan tuli, untuk paham ngomong apa. Tahap pertama. Sampai tahap pertemuan ke 10. Materi beda-beda pertama abjad, dua angka, terus warna dan lain-lain. Yang ngajar harus tuli, karena tuli punya budaya kalo tuli yang ngajar nanti agar lebih paham. Kelas bisindo ada yang dari pemerintah, umum, mahasiswa, sekolah menengah bisa, macem-macem, tergantung niat nya yang mau belajar silakan.
2	Pelatihan Kelas Bisindo untuk teman-teman tuli seperti apa?	Untuk teman tuli itu kelasnya beda, yang teman-teman dengar itu belajar yang mudah-mudah dari dasar dulu. Untuk kelas tuli itu materinya lebih dalam lagi. Tapi kita fokus teman dengar dulu karena lebih banyak materinya. Kalo tuli ada materinya tapi berbeda. Teman-teman tuli harus sering sering kumpul agar cepat menguasai Bisindo, kalo tidak aktif tidak bisa. Materi kepada teman tuli itu berbeda tergantung dengan background pendidikannya juga. Teman tuli ada yang tidak paham tetnang bahasa Indonesia juga ada, tidak bisa membaca juga ada, pendidikan nol juga ada. Makanya meterinya tergantung pada background teman-teman tuli.
3	Apa harapan dari pelatihan Kelas Bisindo ini?	Semoga Bisindo bisa menjangkau teman dengar dan teman tuli, semua sama. Agar komunikasi lancer, dan paham jika da komunisinya seperti apa. Bisindo bukan Cuma untuk tuli saja tapi untuk semua.

HASIL DOKUMENTASI  
KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Linda tanggal 27 April 2018 di Gedung Sriratu Telkom Infomedia.



Wawancara dengan Mbak Indira tanggal 14 April 2018 di Merby Semarang



Wawancara dengan Mas Fitra tanggal 14 April 2018 di Merby Semarang



Kegiatan di Komunitas Karunia Ilahi Meteseh tanggal 29 Agustus 2017



Advokasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama 15 komunitas difabel serta 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 20 September 2017

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Fatmawati

Jabatan : Ketua DPC PPDI Kota Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : Moh Nashir Hasan

NIM : 131411029

Institusi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian di PPDI DPC Kota Semarang pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 1 Juni 2018 judul penelitian skripsi “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang 4 Juli 2018

Ketua



Linda Fatmawati

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Nashir Hasan  
Nim : 131411029  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 29 Juli 1995  
Alamat Asal : DK Puluhan Sokopuluhan Pucakwangi Pati  
Jenjang Pendidikan :

1. SD Matholi'ul Huda Pucakwangi 2007
2. Mts. Matholi'ul Huda Pucakwangi 2010
3. MA Matholi'ul Huda Pucakwangi 2013
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis

Moh Nashir Hasan  
NIM 131411029